

**PENGARUH *GOOD GOVERNANCE*, PENGELUARAN PEMERINTAH, DAN
FOREIGN DIRECT INVESTMENT TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI
ASEAN**

(Skripsi)

Oleh:

RIA NITAMI

2111021074



JURUSAN EKONOMI PEMBANGUNAN

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UNIVERSITAS LAMPUNG

2025

ABSTRACT

THE EFFECT OF GOOD GOVERNANCE, GOVERNMENT SPENDING, AND FOREIGN DIRECT INVESTMENT ON ASEAN ECONOMIC GROWTH

By

Ria Nitami

This study aims to analyze the impact of good governance, government spending, and Foreign Direct Investment (FDI) on economic growth in developing ASEAN member countries during the period 1996–2023. The method used is panel time series data regression analysis with a quantitative approach.

The results show that the impact of good governance on economic growth varies between countries and between indicators. The Voice and Accountability indicator has a positive effect in Laos and Vietnam; Political Stability is significant in Cambodia and Malaysia; Government Effectiveness has a positive impact in the Philippines, Indonesia, Laos, and Thailand; Regulatory Quality is significant in Laos, Cambodia, and Vietnam; Rule of Law has a positive effect in five countries but a negative effect in Laos and Cambodia; while Control of Corruption is only significant in the Philippines and Malaysia.

Government spending has a positive impact in the Philippines, Laos, Cambodia, and Vietnam, but a negative impact in Indonesia, Malaysia, and Thailand. FDI has a positive impact in the Philippines, Laos, Malaysia, Thailand, and Vietnam, but a negative impact in Indonesia and Cambodia. Overall, these three variables play a crucial role in driving economic growth in ASEAN developing countries. Therefore, strengthening governance, improving government spending efficiency, and creating a conducive investment climate are essential to achieving sustainable economic growth.

Keywords: Good Governance, Government Expenditure, FDI, Economic Growth, ASEAN, Time Series

ABSTRAK

PENGARUH *GOOD GOVERNANCE*, PENGELUARAN PEMERINTAH, DAN *FOREIGN DIRECT INVESTMENT* TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI ASEAN

Oleh

Ria Nitami

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh *good governance*, pengeluaran pemerintah, dan *Foreign Direct Investment* (FDI) terhadap pertumbuhan ekonomi di negara berkembang anggota ASEAN periode 1996–2023. Metode yang digunakan adalah regresi time series dengan data sekunder dari *World Bank* dan *Worldwide Governance Indicators*.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaruh *good governance* terhadap pertumbuhan ekonomi bervariasi antar negara dan antar indikator. Indikator Voice and Accountability berpengaruh positif di Laos dan Vietnam; Political Stability signifikan di Kamboja dan Malaysia; Government Effectiveness berdampak positif di Filipina, Indonesia, Laos, dan Thailand; Regulatory Quality berpengaruh di Laos, Kamboja, dan Vietnam; Rule of Law berpengaruh positif di lima negara namun negatif di Laos dan Kamboja; sementara Control of Corruption hanya signifikan di Filipina dan Malaysia.

Pengeluaran pemerintah memiliki pengaruh positif di Filipina, Laos, Kamboja, dan Vietnam, namun negatif di Indonesia, Malaysia, dan Thailand. FDI memberikan pengaruh positif di Filipina, Laos, Malaysia, Thailand, dan Vietnam, namun negatif di Indonesia dan Kamboja. Secara keseluruhan, ketiga variabel tersebut memiliki peran penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi negara-negara berkembang ASEAN. Oleh karena itu, diperlukan penguatan tata kelola, efisiensi belanja pemerintah, serta penciptaan iklim investasi yang kondusif untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Kata kunci: *Good Governance*, Pengeluaran Pemerintah, FDI, Pertumbuhan Ekonomi, ASEAN, Time Series

PENGARUH GOOD GOVERNANCE, PENGELUARAN PEMERINTAH, DAN FOREIGN
DIRECT INVESTMENT TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI ASEAN

Oleh:

RIA NITAMI

Skripsi

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar
SARJANA EKONOMI

Pada

Jurusan Ekonomi Pembangunan
Fakultas Ekonomi Dan Bisnis



JURUSAN EKONOMI PEMBANGUNAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS LAMPUNG

2025

Judul Skripsi

: Pengaruh *Good Governance*, Pengeluaran
Pemerintah, Dan *Foreign Direct Investment*
Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Asean

Nama Mahasiswa

: Ria Nitami

Nomor Pokok Mahasiswa

: 2111021074

Program Studi

: Ekonomi Pembangunan

Fakultas

: Ekonomi Dan Bisnis

MENYETUJUI

Komisi Pembimbing I

Komisi Pembimbing II

Prof. Dr. Ambya, S.E., M.Si.

Prayudha Ananta, S.E., M.Si.

NIP. 195907191987031002

NIP. 198809162014041001

MENGETAHUI

Ketua Jurusan Ekonomi Pembangunan

Dr. Arivina Ratih Yulihar Taher, S.E., M.M.

NIP. 198007052006042002

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua

: Prof. Dr. Ambya, S.E., M.Si.

Ambya
.....

Penguji I

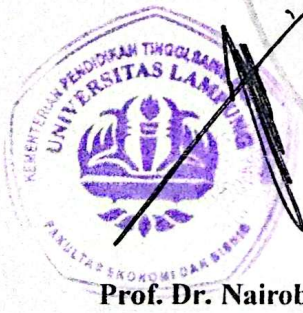
: Arif Darmawan, S.E., M.A.

Arif Darmawan
.....

Penguji II

: Prayudha Ananta, S.E., M.Si.

2. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis



Prof. Dr. Nairobi, S.E., M.Si.

NIP. 196606211990031003

Tanggal Lulus Ujian Skripsi: 28 Juli 2025

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ria Nitami

NPM : 2111021074

Konsentrasi : Ekonomi Publik Dan Fiskal

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul “Pengaruh *Good Governance*, Pengeluaran Pemerintah, Dan *Foreign Direct Investment* Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Asean” telah ditulis dengan sungguh-sungguh dan bukan merupakan penjiplakan hasil karya orang lain. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar maka saya sanggup menerima hukuman dan sanksi yang berlaku.

Bandar Lampung, 28 Juli 2025

Yang Membuat Pernyataan,


Ria Nitami

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama Ria Nitami, lahir di Way Kanan, Provinsi Lampung, pada tanggal 5 Januari 2003. Penulis merupakan anak pertama dari tiga bersaudara, putri dari pasangan Bapak Sukono dan Ibu Tukimah. Pendidikan dasar ditempuh di SD Negeri 1 Marga Jaya dan diselesaikan pada tahun 2015. Selanjutnya, penulis melanjutkan pendidikan menengah pertama di SMP Negeri 1 Negara Batin dan lulus pada tahun 2017, kemudian melanjutkan ke jenjang menengah kejuruan di SMK Negeri 1 Negara Batin dan berhasil menyelesaikannya pada tahun 2021.

Pada tahun 2021, penulis diterima sebagai mahasiswa Program Studi Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Lampung, melalui jalur Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN). Selama menjalani pendidikan di perguruan tinggi, penulis aktif dalam berbagai kegiatan organisasi dan pengembangan diri. Penulis menjadi anggota UKM-F PILAR FEB Unila pada tahun 2022, dan pada tahun 2023 dipercaya sebagai Sekretaris Divisi Media di UKM-F ROIS FEB Unila. Selain kegiatan organisasi, penulis juga mengikuti penelitian MBKM pada tahun 2023, magang mandiri di Badan Pengelola Usaha (BPU) Universitas Lampung pada tahun 2023–2024, serta berpartisipasi dalam program pengembangan diri ISQ School pada periode Mei–Juni 2025.

MOTTO

Fa Inna Ma'al Usri Yusra

“Karena sesungguhnya setelah kesulitan itu ada kemudahan”

(Al-Insyirah:5)

“Segala masalah akan berlalu dengan kesabaran, kerja keras, dan adanya teman disampingmu”

(Ibunda – 2023)

“Jadilah dan perjuangkan apa yang kamu inginkan, selagi hal itu baik untukmu dan masa depanmu”

(Ayahanda - 2021)

PERSEMBAHAN

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala rahmat, nikmat, dan petunjuk-Nya yang telah menyertai setiap langkah hingga skripsi ini dapat diselesaikan. Karya sederhana ini penulis persembahkan untuk kedua orang tua tercinta, Bapak Sukono dan Ibu Tukimah, yang dengan kasih sayang, doa, dan pengorbanan tanpa henti telah menjadi sumber kekuatan terbesar dalam hidup penulis. Untuk adik-adik tersayang, terima kasih telah menjadi semangat dalam setiap langkah perjuangan. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh dosen dan civitas akademika Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung, khususnya Program Studi Ekonomi Pembangunan, atas segala ilmu, bimbingan, dan kesempatan yang telah diberikan selama masa studi. Tak lupa, penulis juga menyampaikan rasa terima kasih yang tulus kepada teman-teman seperjuangan terutama F4 atas kebersamaan, tawa, dan dukungan yang menguatkan selama proses panjang ini. Akhirnya, persembahan ini juga ditujukan kepada diri sendiri terima kasih telah bertahan, belajar, dan terus melangkah meski tidak selalu mudah. Semoga langkah ini menjadi awal dari perjalanan yang lebih bermakna.

SANWACANA

Puji syukur penulis ucapkan kehadirat Allah SWT atas segala limpahan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **“Pengaruh *Good Governance*, Pengeluaran Pemerintah, dan *Foreign Direct Investment* terhadap Pertumbuhan Ekonomi ASEAN”** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Program Studi Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Lampung.

Penulisan skripsi ini tentunya tidak terlepas dari bantuan, bimbingan, dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Nairobi, S.E., M.Si., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.
2. Ibu Dr. Arivina Ratih, S.E., M.M., selaku Ketua Jurusan dan Zulfa Emalia, S.E., M.Sc selaku Sekretaris Jurusan Studi Ekonomi Pembangunan.
3. Ibu Dr. Tiara Nirmala, S.E., M.Sc selaku dosen pembimbing akademik yang telah membantu selama masa perkuliahan
4. Prof. Dr. Ambya, S.E., M.Si. Dan Prayudha Ananta, S.E., M.Si. Selaku dosen pembimbing serta ibu Dr. Asih Murwiati, S.E., M.E dan Bapak Arif Darmawan, S.E., M.A. selaku dosen penguji yang telah memberikan arahan, motivasi, dan bimbingan secara konsisten dan penuh kesabaran selama penyusunan skripsi ini.
5. Seluruh dosen dan staf pengajar di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung yang telah membekali penulis dengan ilmu dan wawasan selama masa perkuliahan.

6. Kedua orang tua penulis, Bapak Sukono dan Ibu Tukimah, atas cinta, doa, dan dukungan yang tiada henti, serta seluruh keluarga besar yang senantiasa memberikan semangat. Terimakasih karena telah menjadi orang tua yang selalu mendukung dan memberikan yang terbaik untuk anaknya. Terimakasih telah menjadi orang tua dari Ria Nitami.
7. Adek Rio Ferdiansyah dan adek Rey Sanjaya yang telah menjadi sumber semangat untuk segera menyelesaikan perkuliahan.
8. Teman-teman seperjuangan dan sahabat-sahabat tercinta grup F4 Cahyaning Andayani, Dinda Chairunnisa Abdullah, Linggar Tri Ananda yang selalu memberikan dukungan moral dan semangat dan candaan selama kuliah dan proses penulisan skripsi ini.
9. Terimakasih pada teman-teman satu bimbingan Ade Sulistiana, Filza Listiana, Septiana Tri Susanti, Wina Clara, Vania Balqis yang telah menemani semasa pengerjaan skripsi.
10. Dan terakhir, untuk diri sendiri terima kasih telah bertahan sejauh ini, melewati segala tantangan dan keraguan. Terima kasih karena tidak menyerah dan terus bangkit meski terjatuh.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, saran dan kritik yang membangun sangat penulis harapkan demi perbaikan di masa mendatang. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang ekonomi pembangunan.

Bandar Lampung, Juli 2025

Ria Nitami

2111021074

DAFTAR ISI

	Halaman
DAFTAR ISI	i
DAFTAR GAMBAR	iv
DAFTAR TABEL	v
I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	16
1.3 Tujuan Penelitian	16
1.4 Manfaat Penelitian	16
II. TINJAUAN PUSTAKA	19
2.1 Peran Pemerintah	19
2.2 Pertumbuhan Ekonomi	20
2.2.1 Definisi Pertumbuhan Ekonomi.....	20
2.4 Pengeluaran Pemerintah	23
2.5 Foreign Direct Invesment	25
2.6 Teori Penelitian.....	26
2.6.1 Teori Pertumbuhan Ekonomi.....	26
2.6.2 Teori Fiskal (Pengeluaran Pemerintah)	27
2.6.3 Teori Investasi.....	30
2.7 Hubungan Antar Variabel.....	32
2.7.1 Hubungan <i>Good Governance</i> dan Pertumbuhan Ekonomi	32
2.7.2 Hubungan Pengeluaran Pemerintah dan Pertumbuhan Ekonomi.....	32
2.7.3 Hubungan FDI dan Pertumbuhan Ekonomi	33
2.8 Penelitian Terdahulu	33
2.9 Kerangka Berpikir	39
2.10 Hipotesis	39
III. METODE PENELITIAN	40

3.1 Jenis dan Ruang Lingkup Penelitian	40
3.1.1. Jenis Penelitian	40
3.1.2. Ruang Lingkup Penelitian.....	40
3.2 Data dan Sumber Data.....	40
3.3 Definisi Operasional.....	41
3.3.1. Pertumbuhan Ekonomi.....	41
3.3.2. <i>Good governance</i>	42
3.3.3. Pengeluaran Pemerintah.....	42
3.3.4. Foreign Direct Invesment.....	43
3.4 Metode dan Model Analisis Data	43
3.4.1 Model Penelitian	43
3.4.2 Metode Analisis Data	44
IV. HASIL DAN PEMBAHASAN	48
4.1 Analisis Deskriptif	48
4.2 Asumsi Klasik.....	50
4.2.1 Uji Normalitas	50
4.2.2 Uji Multikolinearitas	50
4.2.3 Uji Autokorelasi dan Heteroskedasitas	51
4.3 Uji Regresi Linear	52
4.4 Uji Hipotesis	54
4.5 Uji F	57
4.6 Uji Koefisien Determinasi (R^2).....	58
4.7 Pembahasan Penelitian	59
4.7.1 Pengaruh <i>Good Governance</i> Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Negara Asean	59
4.7.2 Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Negara Asean	63
4.7.3 Pengaruh <i>Foreign Direct Invesment</i> Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Negara Asean	64
V. KESIMPULAN DAN SARAN	66
5.1 Kesimpulan.....	66

5.2 Saran.....	68
DAFTAR PUSTAKA.....	70
LAMPIRAN	

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1 Persentase Pertumbuhan Ekonomi Negara Berkembang Asean Tahun 1996-2023 (%)	3
Gambar 2 Rata-Rata Indikator <i>Good Governance</i> Negara Berkembang Asean 1996-2023	6
Gambar 3 Indikator <i>Good Governance</i> Negara Berkembang Asean Pada Periode 1996-2023.....	8
Gambar 4 Perkembangan Pengeluaran Pemerintah Berdasarkan <i>Gross National Expenditure</i> Di ASEAN Tahun 1996-2023.....	12
Gambar 5 Perkembangan <i>Foreign direct investment, net inflows</i> (% of GDP) ASEAN 1996-2023.....	15

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 3.1 Sumber Data Penelitian.....	41
Tabel 4.1 Hasil Deskriptif Negara- Negara Berkembang ASEAN.....	48
Tabel 4.2 Hasil Uji Multikolinearitas.....	50
Tabel 4.3 Hasil Uji Regresi Negara-Negara Berkembang ASEAN.....	52
Tabel 4.4 Hasil Uji Hipotesis T-Statistik.....	55
Tabel 4.5 Hasil Uji F.....	58

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pertumbuhan ekonomi adalah proses peningkatan hasil produksi barang dan jasa dalam suatu perekonomian yang berlangsung secara bertahap, dengan tujuan mencapai kondisi ekonomi yang lebih baik dalam jangka waktu tertentu di suatu negara. Pertumbuhan ekonomi diartikan sebagai proses kenaikan kapasitas produksi perekonomian yang terwujud dalam bentuk pendapatan nasional. Pertumbuhan ekonomi dapat menjadi indikasi dari keberhasilan perekonomian dan menjadi tolak ukur tingkat perkembangan perekonomian negara (Kemenkeu, 2018). Menurut *World Bank* (2023), pertumbuhan ekonomi diukur melalui perubahan volume output atau pendapatan riil masyarakat suatu negara, dan dapat pula dinilai berdasarkan perubahan Produk Domestik Bruto (PDB) pada harga konstan. Indikator-indikator dasar dalam aktivitas ekonomi suatu negara mencerminkan tingkat kesejahteraan ekonomi masyarakatnya.

Menurut Kementerian PPN (Perencanaan Pembangunan Nasional)/ Bapennas (2020), pertumbuhan ekonomi memiliki peranan penting terutama dalam pengembangan kebijakan dan inovasi yang dapat meningkatkan produktivitas dan efisiensi. Pertumbuhan ekonomi sebagai indikator utama yang digunakan untuk menilai keberhasilan pembangunan sebuah negara. Hal ini dilihat peningkatan output barang dan jasa dalam efektivitas kegiatan ekonomi (Putri & Idris, 2024). Bagi pemerintah kebijakan yang tepat dapat menjaga permintaan agregat tetap tumbuh sejalan dengan kapasitas produktif untuk menstabilkan pertumbuhan adalah kebijakan fiskal dan kebijakan moneter (Hudson, 2020). Pertumbuhan ekonomi didasari oleh pendapatan nasional melalui pertumbuhan ekonomi Produk Domestik Bruto (PDB) perkapita yang merupakan ukuran standard nilai tambah yang tercipta melalui produksi barang dan jasa selama periode tertentu dikurangi dengan impor (OECD, 2022).

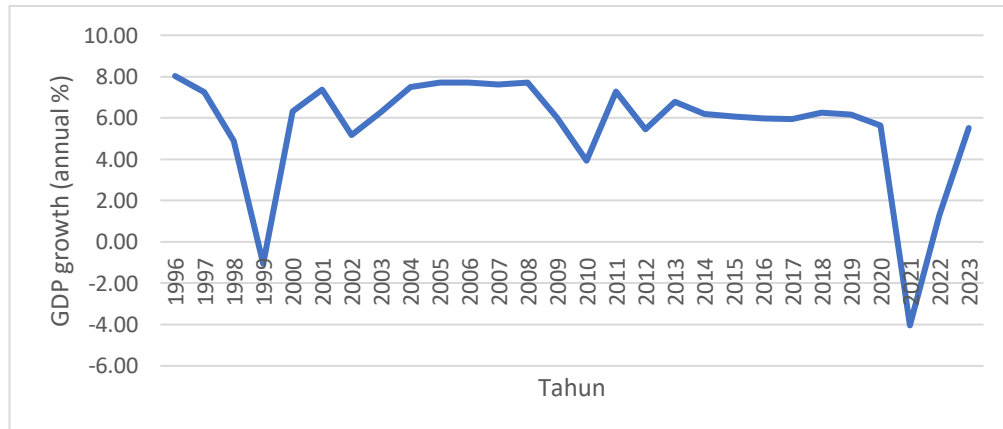
Pertumbuhan ekonomi merupakan elemen penting dalam perekonomian yang mencerminkan tingkat pembangunan dan kesejahteraan suatu negara. Pertumbuhan ini terjadi ketika terjadi peningkatan dalam produksi dan efisiensi, yang pada akhirnya mendorong kenaikan pendapatan serta perbaikan taraf hidup masyarakat (Kumaat, et.al, 2019). Pertumbuhan ekonomi akan meningkatkan peluang kerja yang membantu dalam mengurangi tingkat kemiskinan dan pengangguran (Gafur & Rochaida, 2022). Investasi pada infrastruktur dan teknologi yang meningkatkan produktivitas akan meningkatkan dan mempertahankan pembangunan ekonomi dalam jangka panjang (Rana, 2022). Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Hativey (2021) dan Elena, et.al. (2018) menyimpulkan bahwa arus investasi akan menyediakan sumber daya yang diperlukan dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Dalam konteks negara maju dan berkembang, negara maju umumnya termasuk dalam kategori berpendapatan tinggi, sementara negara berkembang terdiri dari negara-negara dengan pendapatan rendah, menengah bawah, dan menengah atas. Klasifikasi ini diperbarui setiap tahun oleh *World Bank* berdasarkan data ekonomi terbaru (World Bank, 2022). *World Bank* mengklasifikasikan negara berdasarkan pendapatan nasional bruto (GNI) per kapita ke dalam empat kategori utama. Negara berpendapatan rendah (*low-income countries*) memiliki GNI per kapita kurang dari atau sama dengan \$1.135, negara berpendapatan menengah bawah (*lower-middle-income countries*) memiliki GNI per kapita antara \$1.136 hingga \$4.465, negara berpendapatan menengah atas (*upper-middle-income countries*) memiliki GNI per kapita antara \$4.466 hingga \$13.845, dan negara berpendapatan tinggi (*high-income countries*) memiliki GNI per kapita di atas \$13.846.

Di kawasan ASEAN (*Association of Southeast Asian Nations*), sebagian besar negara termasuk dalam kategori negara berkembang berdasarkan klasifikasi *World Bank*. Negara-negara berkembang di ASEAN meliputi Indonesia, Filipina, Vietnam, Thailand, Malaysia, Kamboja, dan Laos. ASEAN sebagai negara di kawasan Asia Tenggara menunjukkan kinerja ekonomi yang kuat dengan rata-rata tingkat pertumbuhan ekonomi 4,4% dari tahun 2010-2022. Ketangguhan ekonomi ASEAN terbukti dengan kemampuan beradaptasi dan pulih cepat dari pandemi Covid-19. Hal ini menempatkan ASEAN dalam

peringkat kelima dalam ekonomi terbesar dunia dengan PDB sekitar USD 3,6 triliun di tahun 2022 (Biswas R., 2024).

Dari *ASEAN Investment Report* melaporkan pertumbuhan ekonomi yang pesat dan lokasi yang strategis membuat ASEAN menjadi tujuan menarik untuk investasi asing yang terbukti dengan peringkat terbesar kedua sebagai penerima investasi asing yang mencapai \$234 triliun pada tahun 2023. Pada tahun 2023, ekonomi ASEAN mencapai US\$3,8 triliun menempatkannya sebagai yang terbesar ke-5 di dunia dan terbesar ke-3 di Asia. *World Economic Forum* menyatakan bahwa populasi ASEAN menduduki posisi ketiga dengan jumlah 676,6 juta jiwa atau 8% dari total populasi Asia di tahun 2023 yang menjadi pendorong utama dalam perekonomian. Oleh karena itu, ASEAN sebagai kawasan yang sangat dinamis dan menjanjikan dari segi ekonomi yang mendorong stabilitas ekonomi, daya tarik investasi, dan potensi yang besar menjadikan ASEAN sebagai salah satu kawasan ekonomi yang paling penting di dunia. Berikut adalah data pertumbuhan ekonomi negara berkembang ASEAN tahun 1996-2023:



Gambar 1 Persentase Pertumbuhan Ekonomi Negara Berkembang ASEAN Tahun 1996-2023 (%)

Sumber: *World Development Indicator by World Bank 2025, diolah*

Dari gambar di atas, dapat dilihat bahwa pertumbuhan ekonomi negara-negara berkembang ASEAN selama periode 1996-2023 menunjukkan pertumbuhan ekonomi sensitif terhadap perubahan. Hal ini dapat dilihat dari gambar 1 yang memiliki pola naik turun yang signifikan. Penurunan tajam terjadi akibat krisis ekonomi tahun 1997-1998

dan krisis keuangan global tahun 2008-2009, serta ketika pandemi Covid-19 pada tahun 2020 yang berdampak pada penurunan ekonomi yang negatif. Namun, setelah mengalami penurunan, ekonomi ASEAN pulih dengan cepat dan stabil di kisaran 4-6%. Secara keseluruhan, meski pertumbuhan ekonomi ASEAN sensitif namun ketahanan perekonomian ASEAN cukup baik meski menghadapi beberapa krisis besar dan menjadi salah satu pusat perekonomian dunia.

Selanjutnya, dalam pertumbuhan ekonomi salah satu faktor kunci yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di negara-negara ASEAN adalah *good governance* atau tata kelola pemerintah. Menurut *World Bank* (2024) pada *The Worldwide Governance Indicators* (WGI) menggambarkan pola yang luas dalam persepsi kualitas tata kelola pemerintahan di seluruh negara dan dari waktu ke waktu. Dalam konteks negara-negara berkembang, penerapan prinsip-prinsip tata kelola pemerintah menjadi sangat penting untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi investasi dan pembangunan. Tata kelola yang lemah dapat menjadi penghambat serius bagi pertumbuhan ekonomi karena menciptakan kondisi yang sarat dengan ketidakefisienan, praktik korupsi, dan minimnya tanggung jawab (Worldbank, 2024).

Kualitas tata kelola pemerintahan seringkali terkait dengan alokasi dan pemanfaatan sumber daya yang efektif. Spilioti menyoroti bahwa negara-negara dengan kualitas tata kelola pemerintahan yang lebih tinggi cenderung memanfaatkan *European Structural and Investment Funds* (ESIF) secara lebih efisien, sehingga meningkatkan pembangunan ekonomi regional (Spilioti, 2024). Sebaliknya, jika tata kelola pemerintahan tidak berjalan dengan baik, alokasi sumber daya bisa menjadi tidak tepat, yang pada akhirnya menghasilkan kinerja ekonomi yang kurang optimal. Malesky et al. (2015), berpendapat bahwa di Vietnam, tata kelola pemerintahan dan transparansi secara langsung mempengaruhi keputusan investasi perusahaan, menunjukkan bahwa tata kelola pemerintahan yang buruk dapat menghambat investasi, yang sangat penting untuk pertumbuhan ekonomi. Hubungan ini semakin didukung oleh temuan Adegboyega dan Arikewuyo (2020), yang menegaskan bahwa buruknya tata kelola perusahaan dapat berdampak negatif secara luas terhadap perekonomian, sehingga diperlukan tata kelola

pemerintahan yang baik guna menciptakan iklim yang mendukung pertumbuhan ekonomi.

Selanjutnya, hubungan sebab-akibat antara tata kelola pemerintahan dan pertumbuhan ekonomi bersifat kompleks dan seringkali bersifat timbal balik. Meskipun telah ditetapkan bahwa tata kelola pemerintahan yang baik mendorong pertumbuhan ekonomi, beberapa penelitian menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi juga dapat menyebabkan peningkatan dalam tata kelola pemerintahan. Dalam penelitian Wilson (2016), membahas tentang bagaimana pembangunan ekonomi dapat memberikan pemerintah dengan sumber daya yang diperlukan untuk menerapkan reformasi tata kelola pemerintahan. Namun, kausalitas terbalik dapat menutupi efek buruk dari tata kelola pemerintahan yang buruk terhadap pertumbuhan, seperti yang dicatat oleh Malesky et al. (2015), yang menyarankan bahwa ketika wilayah tumbuh, tata kelola pemerintahan lokal dapat memburuk karena perilaku mencari rente.

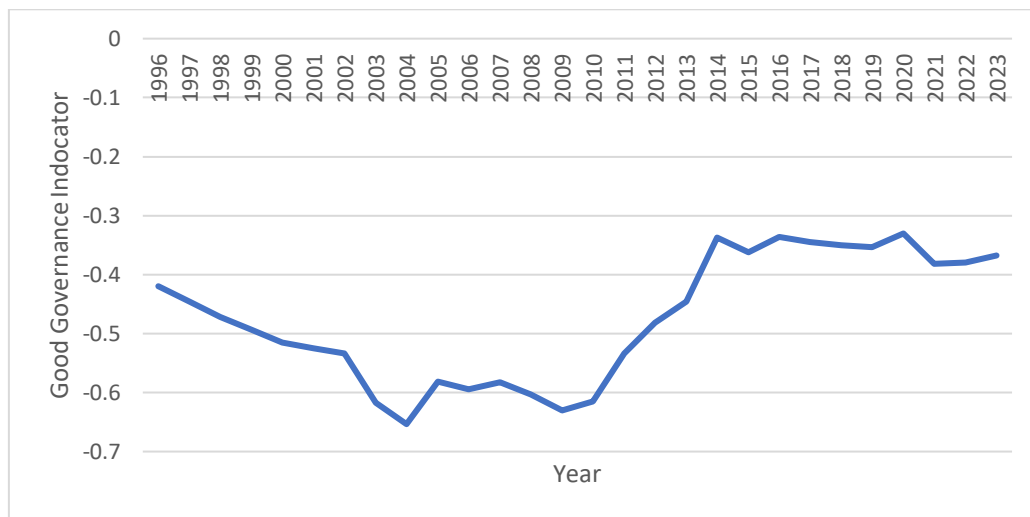
Dalam konteks negara berkembang, kualitas tata kelola pemerintahan sangat penting. Dalam penelitian Iddawela et al. (2021), menemukan bahwa lembaga pemerintah pusat ternyata tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap kegiatan ekonomi di tingkat daerah, yang mengindikasikan bahwa kualitas tata kelola di tingkat lokal mungkin memiliki peran yang lebih penting. Hal ini digaungkan oleh temuan Petrakos (2023), yang menekankan korelasi yang kuat antara kualitas tata kelola pemerintahan dan pertumbuhan ekonomi, terutama dalam konteks Yunani. Di Afrika Sub-Sahara, studi Bedemo (2022), mengungkapkan bahwa peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan dapat menyebabkan peningkatan PDB yang signifikan, menggarisbawahi pentingnya tata kelola pemerintahan dalam kinerja ekonomi.

Selanjutnya, dampak negatif dari tata kelola pemerintahan yang buruk seringkali diperburuk oleh korupsi. Zainal et al. (2023), mengilustrasikan bahwa tata kelola pemerintahan yang buruk membuka jalan bagi korupsi, terutama dalam pembangunan infrastruktur, yang dapat sangat membatasi pengembalian investasi ekonomi. Hal ini sejalan dengan temuan Onafowora (2024), yang mengidentifikasi indikator tata kelola

pemerintahan tertentu yang berdampak negatif pada pertumbuhan, seperti pengendalian korupsi dan kualitas peraturan.

Indikator *good governance*, seperti stabilitas pemerintahan, efisiensi pemerintahan, pemberantasan ketidakjujuran, penegakan hukum dan ketertiban, audit dan kebebasan, serta regulasi pemerintah, memiliki dampak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi melalui pengeluaran pemerintah dan FDI.

Berikut disajikan data *Good Government Indicator* negara berkembang ASEAN tahun 1996-2023:



Gambar 2 Rata-Rata Indikator *good governance* Negara Berkembang ASEAN 1996-2023

Sumber: *Worldwide Governance Indicators by World Bank 2025*, diolah

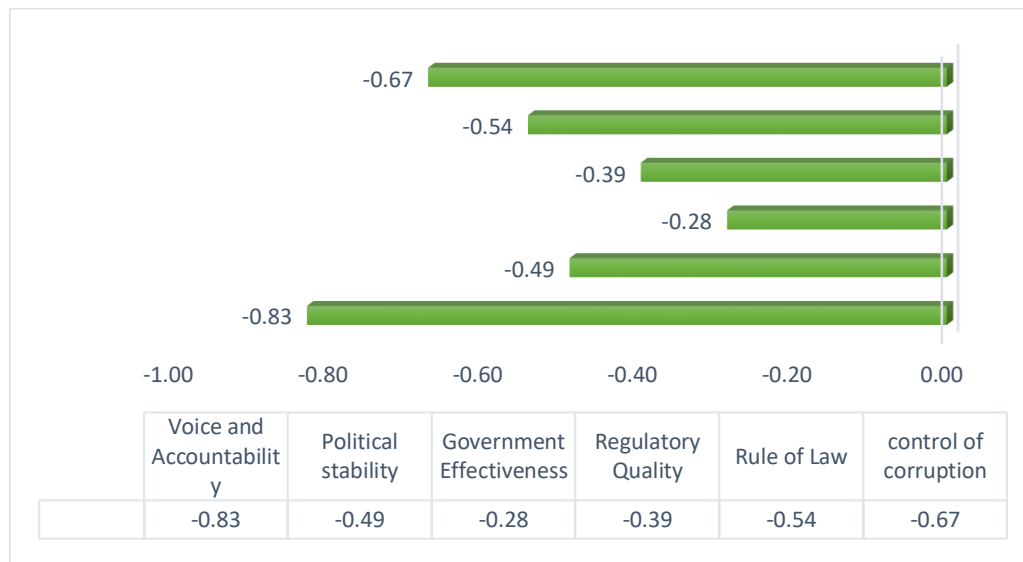
Berdasarkan gambar rata-rata indikator *good governance* untuk negara berkembang di ASEAN pada periode 1996-2023 menunjukkan dinamika yang menarik. Berdasarkan tren yang ditampilkan dalam grafik, tingkat *good governance* di ASEAN mengalami dinamika yang signifikan sepanjang periode 1996–2023. Pada dekade pertama (1996–2005), terjadi penurunan yang mencolok, yang kemungkinan besar dipengaruhi oleh dampak krisis ekonomi Asia 1997–1998. Krisis ini tidak hanya melemahkan stabilitas ekonomi tetapi juga menciptakan ketidakpastian politik di beberapa negara, termasuk Indonesia yang mengalami transisi besar menuju reformasi demokrasi. Indikator tata kelola pemerintahan

mencapai titik terendah sekitar tahun 2005, mencerminkan tantangan dalam efektivitas pemerintahan, stabilitas politik, dan pengendalian korupsi di kawasan.

Namun, pasca-2005, tren menunjukkan pemulihan bertahap yang semakin menguat pada periode 2010–2015. Peningkatan ini kemungkinan besar mencerminkan keberhasilan berbagai reformasi institusional, penguatan kerangka hukum, serta implementasi kebijakan transparansi dan akuntabilitas di beberapa negara ASEAN. Stabilitas makroekonomi, pertumbuhan investasi, serta komitmen terhadap integrasi ekonomi regional melalui ASEAN *Economic Community* (AEC) turut berkontribusi terhadap peningkatan tata kelola pemerintahan. Setelah 2015, tren tata kelola pemerintahan cenderung lebih stabil meskipun masih mengalami fluktuasi ringan. Stabilitas ini mencerminkan adanya upaya konsisten dalam memperbaiki kualitas regulasi, efisiensi birokrasi, dan supremasi hukum di berbagai negara ASEAN. Namun, tantangan baru seperti perang dagang global, pandemi COVID-19, serta perubahan dinamika geopolitik memengaruhi perkembangan tata kelola pemerintahan di kawasan ini. Meskipun demikian, dibandingkan dengan periode 1996–2005, tata kelola pemerintahan di ASEAN telah mengalami peningkatan yang cukup substansial.

Secara keseluruhan, ASEAN telah melalui fase penurunan yang cukup tajam pada akhir 1990-an hingga awal 2000-an, diikuti oleh pemulihan dan perbaikan yang signifikan setelahnya. Meski telah menunjukkan stabilitas pasca-2015, kawasan ini tetap menghadapi tantangan dalam memperkuat transparansi, efektivitas pemerintahan, serta ketahanan institusi di tengah dinamika global yang terus berkembang. Dalam *good governance* terdapat indikator yang menjadi dasar pengukuran baik atau tidaknya *good governance* suatu negara.

Berikut adalah indikator *good governance* negara berkembang ASEAN pada periode 1996-2023:



Gambar 3. Indikator *good governance* negara berkembang ASEAN pada periode 1996-2023

Sumber: *Worldwide Governance Indicators by World Bank 2025*, diolah

Dari gambar di atas dapat dilihat bahwa indikator *Good Government* di negara-negara ASEAN dimana nilai *Voice and Accountability* sebesar -0,83 mencerminkan rendahnya kebebasan berbicara, kebebasan media, serta partisipasi publik dalam pengambilan keputusan pemerintah. *Political Stability* yang bernilai -0,49 menunjukkan adanya risiko ketidakstabilan politik, konflik, atau ketegangan sosial yang cukup tinggi. Sementara itu, *Government Effectiveness* dengan nilai -0,28 mengindikasikan kurang optimalnya efektivitas pemerintah dalam menjalankan kebijakan dan memberikan layanan publik. *Regulatory Quality* yang berada di angka -0,39 mencerminkan rendahnya kemampuan pemerintah dalam merancang dan menerapkan regulasi yang mendukung sektor bisnis dan masyarakat. Selain itu, *Rule of Law* dengan nilai -0,54 menunjukkan lemahnya kepatuhan terhadap hukum, sistem peradilan, serta perlindungan hak-hak hukum. Terakhir, *Control of Corruption* yang memiliki nilai -0,67 mengindikasikan tingginya tingkat korupsi serta kurang efektifnya mekanisme pengawasan dan penegakan hukum terhadap tindakan korupsi. Secara keseluruhan, nilai indikator tata kelola pemerintahan

berada di bawah 0 dan mendekati -1, yang menunjukkan kualitas tata kelola yang masih lemah.

Good governance pada indikator stabilitas pemerintahan menciptakan kepercayaan di kalangan investor, baik domestik maupun asing (Sapanang, et.al, 2024). Ketika pemerintah stabil, risiko politik berkurang, dan investor lebih cenderung untuk berinvestasi. Stabilitas ini juga memungkinkan perencanaan jangka panjang yang lebih baik, yang penting untuk pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Selanjutnya efisiensi dalam pengelolaan sumber daya publik dan pelayanan publik berkontribusi pada peningkatan produktivitas. Pemerintah yang efisien dapat mengalokasikan sumber daya dengan lebih baik, mengurangi pemborosan, dan meningkatkan kualitas layanan publik. Hal ini menciptakan lingkungan yang lebih baik untuk bisnis dan investasi, yang pada gilirannya mendorong pertumbuhan ekonomi. Pemberantasan korupsi dan ketidakjujuran dalam pemerintahan sangat penting untuk menciptakan kepercayaan publik dan investor. Ketidakjujuran dapat menghambat investasi dan mengurangi efisiensi ekonomi. Dengan penegakan hukum yang kuat dan ketertiban umum menciptakan lingkungan yang aman bagi bisnis untuk beroperasi. Ketika hukum ditegakkan secara adil dan konsisten, investor merasa lebih aman untuk berinvestasi.

Indikator selanjutnya adalah proses audit yang transparan dan kebebasan dalam pengawasan publik membantu memastikan akuntabilitas pemerintah. Ketika masyarakat memiliki akses untuk mengawasi tindakan pemerintah, hal ini mendorong transparansi dan akuntabilitas, yang pada gilirannya meningkatkan kepercayaan publik dan investor. Regulasi yang baik dan tidak berlebihan dapat menciptakan lingkungan bisnis yang kondusif. Regulasi yang jelas dan konsisten membantu mengurangi ketidakpastian bagi investor dan pelaku bisnis. Sebaliknya, regulasi yang rumit dan tidak transparan dapat menghambat investasi dan pertumbuhan ekonomi. Secara keseluruhan, *good governance* memainkan peran yang sangat penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi di negara-negara ASEAN. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Cialani et.al (2024) *good governance* berperan dalam menarik investasi baik pengeluaran pemerintah maupun investasi asing melalui indikator hukum dan akuntabilitas yang berkorelasi positif.

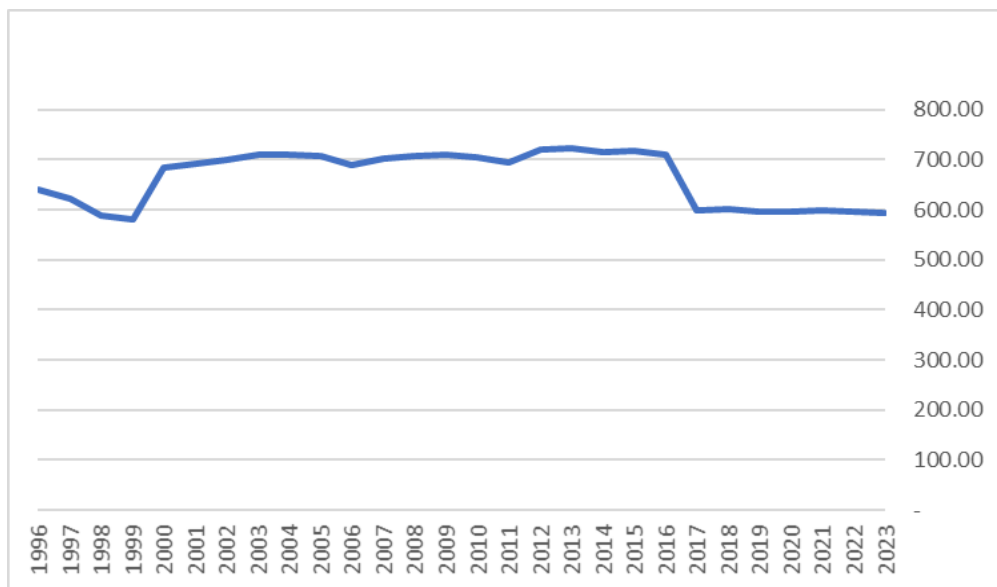
Di kawasan ASEAN pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan menjadi prioritas utama bagi negara-negara anggota, terutama pada pengeluaran pemerintah dan swasta, serta penerapan prinsip *good governance*. Pengeluaran pemerintah di negara-negara ASEAN memiliki hubungan yang kompleks dengan pertumbuhan ekonomi (Canh & Phong, 2017). Pengeluaran pemerintah berperan sebagai motor penggerak pertumbuhan ekonomi dengan mendorong pembangunan infrastruktur serta mendukung upaya pembangunan yang berkelanjutan (Warner, 2014). Pengeluaran pemerintah pada infrastruktur sebagai fasilitas untuk mobilisasi dan perdagangan akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang mengurangi biaya transaksi (Danaj & Reçi, 2024). Investasi dalam pendidikan dan kesehatan berperan penting dalam mengembangkan sumber daya manusia yang menjadi pendorong utama dalam produktivitas dan inovasi untuk menciptakan output perekonomian yang lebih tinggi dan peningkatan standar hidup (Melesko, 2024). Namun, sejumlah temuan menunjukkan bahwa investasi domestik tidak selalu memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi, khususnya di negara-negara berkembang. Sebagai contoh, studi yang dilakukan oleh Bakari terhadap perekonomian Aljazair mengungkapkan bahwa investasi domestik justru berdampak negatif terhadap pertumbuhan ekonomi, yang mengindikasikan bahwa kualitas dan efisiensi investasi memainkan peran krusial dalam menentukan sejauh mana investasi tersebut efektif mendorong pertumbuhan (Bakari, 2018). Demikian pula, studi oleh Rawat dan Khan (2020), menekankan bahwa ketika investasi swasta tidak mencukupi, pinjaman dan pengeluaran pemerintah dapat menyebabkan peningkatan permintaan agregat tetapi mungkin tidak selalu diterjemahkan ke dalam pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Hal ini menyoroti kompleksitas hubungan investasi-pertumbuhan, di mana sifat investasi memainkan peran penting.

Selain itu, kesalahan alokasi pengeluaran pemerintah dapat memperburuk hasil pertumbuhan negatif. Rawat dan Khan (2020), berpendapat bahwa di Pakistan, kerangka kelembagaan yang buruk menyebabkan alokasi sumber daya yang tidak efisien, yang pada akhirnya merusak pertumbuhan ekonomi meskipun adanya potensi manfaat dari Pengeluaran Pemerintah. Hubungan ini semakin rumit oleh korupsi, yang telah terbukti

mengurangi rasio pengeluaran pemerintah dan berdampak negatif pada pertumbuhan ekonomi, sebagaimana dibuktikan di negara-negara WAEMU (Tidiane, 2019).

Investasi infrastruktur, meskipun sering dianggap sebagai katalis pertumbuhan, juga dapat menunjukkan hasil yang semakin berkurang. Zhang et al. (2021) menemukan hubungan berbentuk U terbalik antara investasi infrastruktur dan pertumbuhan ekonomi di China, menunjukkan bahwa investasi yang berlebihan mungkin tidak menghasilkan manfaat ekonomi yang proporsional. Fenomena ini juga tercermin dalam karya Meyer dan Sanusi, yang mencatat bahwa peningkatan inovasi dan teknologi dapat menyebabkan "pertumbuhan tanpa pekerjaan," di mana investasi tidak diterjemahkan ke dalam lapangan pekerjaan atau ekspansi ekonomi (Mayer & Sanusi, 2019). Pengeluaran pemerintah berperan dalam pertumbuhan ekonomi dengan meningkatkan infrastruktur, kesehatan, pendidikan, dan produktivitas secara menyeluruh. Oleh karenanya, pengeluaran pemerintah berperan sebagai stabilitas ekonomi dan pendorong pertumbuhan ekonomi jangka panjang.

Berikut adalah perkembangan pengeluaran pemerintah ASEAN 1996-2023:



Gambar 4 Perkembangan Pengeluaran Pemerintah Berdasarkan Gross national expenditure (% of GDP) Di ASEAN Tahun 1996-2023

Sumber: World Development Indicator by World Bank 2025, diolah

Berdasarkan gambar, menunjukkan bahwa perkembangan pengeluaran pemerintah di ASEAN memiliki tren yang cenderung naik. Hal ini dapat terjadi karena pengeluaran pemerintah sering dipengaruhi oleh siklus bisnis, kebijakan pemerintah, kondisi ekonomi global, dan juga kondisi politik. Fluktuasi grafik mengindikasikan bahwa pengeluaran pemerintah di kawasan ASEAN sensitif terhadap perubahan kondisi ekonomi dan kebijakan pemerintah. Tren yang positif mengindikasikan bahwa negara-negara ASEAN secara bertahap meningkatkan pengeluaran pemerintah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan. Penurunan yang terlihat pada awal periode, kemungkinan besar terjadi karena efek dari krisis keuangan pada tahun 1997 dan tahun 2008 yang mengharuskan pemerintah untuk mengalokasikan dana untuk mengatasi krisis. Setelah krisis, terlihat perkembangan pengeluaran pemerintah meningkat, hal ini karena ASEAN meningkatkan investasi dalam infrastruktur untuk mendukung pertumbuhan ekonomi jangka panjang.

Selanjutnya, dampak investasi terhadap pertumbuhan ekonomi dapat dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti ketidakpastian ekonomi. Dalam penelitian Baker et al. (2015), menunjukkan bahwa ketidakpastian kebijakan dapat menyebabkan penurunan investasi dan lapangan kerja, yang pada akhirnya menghambat pertumbuhan ekonomi. Hal ini relevan pada saat krisis, seperti selama pandemi COVID-19, di mana investasi di pasar modal telah menurun secara signifikan, yang menyebabkan penurunan aktivitas ekonomi (Ismawati, 2023).

Dampak negatif investasi terhadap pertumbuhan ekonomi dapat terjadi melalui beberapa mekanisme. Pertama, investasi yang tidak produktif dapat menghambat efisiensi alokasi sumber daya. Misalnya, investasi dalam proyek-proyek yang tidak layak secara ekonomi atau yang tidak sesuai dengan kebutuhan pasar dapat menyebabkan pemborosan sumber daya dan mengurangi produktivitas keseluruhan. Kedua, kelebihan investasi dalam sektor tertentu dapat menyebabkan ketidakseimbangan ekonomi. Misalnya, investasi berlebihan dalam sektor properti dapat menyebabkan gelembung aset dan akhirnya mengakibatkan penurunan tajam dalam aktivitas ekonomi. Ketiga, investasi yang didorong oleh spekulasi dapat menyebabkan volatilitas pasar dan ketidakstabilan ekonomi. Investasi yang didorong oleh ekspektasi keuntungan jangka pendek yang tidak realistis dapat

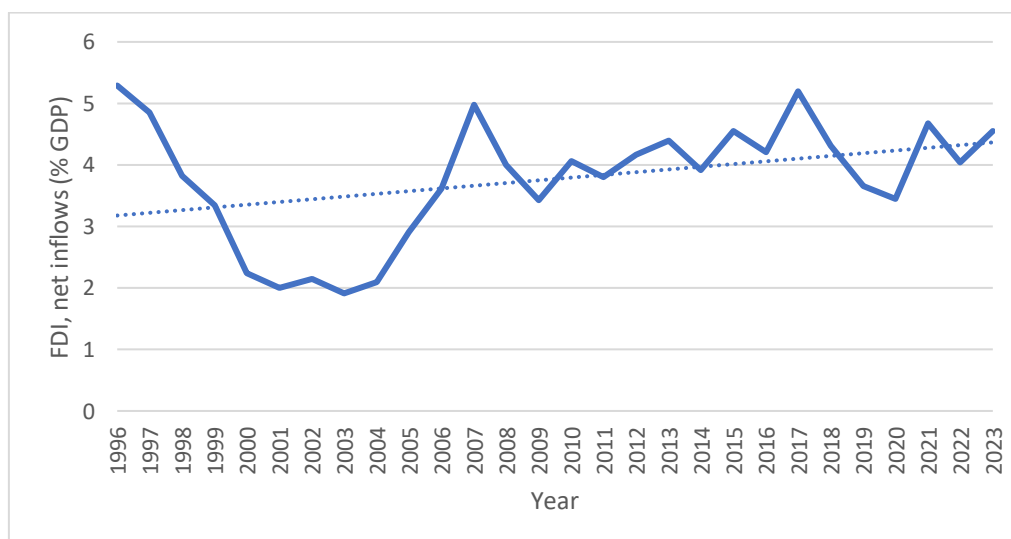
menciptakan gelembung aset dan akhirnya mengakibatkan kerugian ekonomi yang signifikan.

Beberapa faktor dapat memperburuk dampak negatif investasi terhadap pertumbuhan ekonomi. Kualitas institusi yang lemah, seperti penegakan hukum yang buruk dan korupsi yang tinggi, dapat menciptakan lingkungan yang tidak kondusif bagi investasi yang produktif. Ketidakpastian kebijakan yang tinggi, seperti perubahan peraturan yang sering dan tidak terduga, dapat mengurangi kepercayaan investor dan menghambat investasi. Krisis ekonomi juga dapat memperburuk dampak negatif investasi. Misalnya, selama resesi, permintaan akan investasi cenderung menurun, yang dapat memperlambat pertumbuhan ekonomi.

Hal ini sejalan dengan penelitian Nguyen dan Trinh (2018), bahwa pengeluaran pemerintah berpengaruh negatif terhadap perekonomian jangka pendek, namun dalam jangka panjang akan memiliki pengaruh yang positif terutama jika disertai dengan FDI. Demikian pula dengan studi yang dilakukan oleh Yuliana (2023) menyoroti bahwa, FDI berpengaruh positif dan signifikan pada pertumbuhan ekonomi kawasan ASEAN, yang memperkuat gagasan bahwa pengeluaran pemerintah dapat menarik FDI, yang sangat penting untuk pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Namun OECD menyatakan pengeluaran pemerintah dapat menimbulkan dampak negatif pada perekonomian seperti inefisiensi alokasi sumber daya, peningkatan utang publik dan potensi korupsi. Menurut penelitian Hossin, et.al, (2024), pengeluaran pemerintah dalam sektor energi menurunkan tingkat pertumbuhan ekonomi sebesar 8,3% di kawasan ASEAN. Model supermultiplikator menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah mungkin tidak mendorong pertumbuhan jangka panjang, yang secara signifikan mempengaruhi aktivitas ekonomi selama fase transisi (Gallo, 2024). Selain itu, terdapat korelasi negatif antara investasi dan utang publik, yang menunjukkan bahwa jenis pengeluaran pemerintah tertentu mungkin tidak berkelanjutan secara finansial dan dapat menyebabkan peningkatan tingkat utang (Sulong, et.al, 2024). Hal ini sejalan dengan penelitian Khotob (2024) yang menyatakan bahwa akumulasi utang negara ASEAN berdampak buruk pada investasi domestik dan asing, yang dapat menghambat pembangunan ekonomi.

Selain Pengeluaran Pemerintah, FDI juga menjadi salah satu pendorong dalam pertumbuhan ekonomi khususnya *Foreign Direct Investment* (FDI) dengan menciptakan lapangan kerja, meningkatkan produktivitas, dan transfer teknologi (Phong, 2017). Menurut Grace (2019) FDI telah berperan sebagai motor utama dalam mendorong perekonomian ASEAN, di mana setiap peningkatan 1% dalam PDB diketahui berkorelasi dengan lonjakan FDI sebesar 5,27%. Parianom (2024) dalam penelitiannya menyimpulkan bahwa FDI dalam infrastruktur logistik penting untuk pertumbuhan ekonomi melalui kebijakan regionalnya. Namun FDI dapat berdampak negatif pada perekonomian melalui kelestarian lingkungan dan ketimpangan pendapatan (Fry, 1993). Sementara FDI sering dipandang sebagai katalis untuk pembangunan yang dapat menghambat pertumbuhan ekonomi dan memperburuk masalah lingkungan (Kim, 2023). Interaksi antara pengeluaran pemerintah dan swasta mengungkapkan bahwa pengeluaran pemerintah dapat merangsang pertumbuhan sektor swasta dari waktu ke waktu, terutama melalui kemitraan publik-swasta (Canh & Phong, 2017). Menurut Buhaerah (2017) pada FDI, indikator finansialisasi seperti kapitalisasi pasar saham, telah terbukti memperburuk ketidaksetaraan pendapatan di negara-negara ASEAN.

Berikut adalah data perkembangan FDI di ASEAN tahun 1996-2023:



Gambar 5 Perkembangan *Foreign Direct Investment, Net Inflows (% of GDP)* ASEAN 1996-2023

Sumber: *World Development Indicators by World Bank 2025*, diolah

Berdasarkan gambar di atas, dapat dilihat bahwa tren FDI *inflows* (% of GDP) di ASEAN meskipun fluktuatif, namun data FDI menunjukkan tren naik secara keseluruhan dari tahun 1996 hingga 2023. Meskipun pada awal periode 1996-2000 menurun, namun mulai stabil naik dari tahun 2010. Penurunan ini disebabkan oleh krisis finansial Asia tahun 1997-1998 dan juga krisis keuangan di tahun 2008 yang berefek besar pada ekonomi kawasan ASEAN. Pada periode 2010-2023 terjadi tren kenaikan FDI yang lebih stabil, menunjukkan bahwa ASEAN semakin menarik untuk menjadi destinasi investasi asing dengan kebijakan yang mendukung dalam pertumbuhan jangka panjang. Faktor lain seperti kondisi ekonomi global, tingkat suku bunga, harga komoditas dan kebijakan moneter negara-negara maju mempengaruhi aliran masuk FDI ke kawasan ASEAN. Secara umum, aliran tren FDI ke ASEAN cenderung positif, menunjukkan bahwa ASEAN masih menjadi tujuan investasi yang menarik bagi investor asing.

Sejalan dengan penelitian di Nigeria dan Pakistan oleh Ndanusa et.al, (2024) dan Bhutto, et.al (2023) menunjukkan bahwa peningkatan investasi asing berkorelasi dengan tingkat pertumbuhan PDB yang lebih tinggi. Di negara berkembang, baik pengeluaran pemerintah maupun swasta telah menunjukkan efek positif yang kuat pada pertumbuhan ekonomi, menyoroti pentingnya FDI bahkan dalam konteks tata kelola yang kurang stabil (2021). Dalam penelitian Biswas (2024) FDI sangat penting dalam penciptaan lapangan kerja, terutama di sektor-sektor seperti infrastruktur, yang dapat mengarah pada peningkatan produktivitas dan efisiensi ekonomi. Secara keseluruhan, FDI berperan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan stok modal, mendorong inovasi, dan menciptakan lapangan kerja yang penting dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan. FDI secara signifikan berkontribusi pada Produk Domestik Bruto (PDB) negara.

Secara keseluruhan pertumbuhan ekonomi adalah indikator utama kesejahteraan suatu negara. Di ASEAN *good governance*, pengeluaran pemerintah, dan *Foreign Direct Investment* (FDI) berperan penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. *Good governance* menciptakan stabilitas dan transparansi, pengeluaran pemerintah mendukung infrastruktur, sementara FDI meningkatkan lapangan kerja dan daya saing. Meskipun

ASEAN menunjukkan ketahanan ekonomi yang kuat, tantangan seperti regulasi yang belum optimal dan fluktuasi ekonomi global tetap ada. Oleh karena itu, kebijakan yang tepat diperlukan untuk memastikan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

1.2 Rumusan Masalah

- 1) Tata kelola pemerintahan yang baik seharusnya memastikan pengeluaran pemerintah dan FDI berdampak positif. Namun, di banyak negara ASEAN, birokrasi yang lamban, regulasi yang tidak konsisten, dan korupsi masih menjadi hambatan. *Good governance* dapat mempengaruhi efektivitas investasi dalam mendorong pertumbuhan ekonomi
- 2) Pengeluaran pemerintah di ASEAN diharapkan mendorong pertumbuhan ekonomi di negara berkembang. Namun pada faktanya, pengeluaran pemerintah efektif dalam mendorong pertumbuhan ekonomi
- 3) FDI dianggap sebagai pendorong utama pertumbuhan ekonomi, tetapi manfaatnya tidak selalu merata. Realitas di lapangan menunjukkan bahwa tidak semua negara ASEAN mendapatkan manfaat yang sama dari masuknya investasi asing dapat menguntungkan ekonomi domestik secara nyata

1.3 Tujuan Penelitian

- 1) Menganalisis peran *good governance* dalam pertumbuhan ekonomi setiap negara-negara berpendapatan menengah di ASEAN
- 2) Menganalisis pengaruh antara pengeluaran pemerintah dengan pertumbuhan ekonomi di ekonomi setiap negara-negara berpendapatan menengah di ASEAN
- 3) Menganalisis pengaruh antara FDI dengan pertumbuhan ekonomi di ekonomi setiap negara-negara berpendapatan menengah di ASEAN

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Akademis
 - a) Menambah literatur terkait hubungan *good governance*, Pengeluaran Pemerintah, dan *Foreign Direct Investment* (FDI) terhadap pertumbuhan ekonomi di negara berkembang ASEAN.

- b) Memberikan referensi bagi penelitian selanjutnya mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di kawasan ASEAN.

2. Manfaat Praktis

- a) Memberikan wawasan bagi pemerintah dan pembuat kebijakan dalam merancang kebijakan ekonomi yang lebih efektif untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.
- b) Membantu investor dan sektor swasta dalam memahami faktor-faktor yang mempengaruhi stabilitas ekonomi dan peluang investasi di ASEAN.

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Peran Pemerintah

Pemerintah mempunyai peran penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Peran pemerintah tercermin dalam pengeluaran pemerintah, investasi, tenaga kerja dan indeks pembangunan manusia, dan lain-lain, sebagai faktor pendukung dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Selain sebagai pengatur perekonomian, pemerintah juga merupakan agen ekonomi dan menjalankan kegiatan usaha pada sektor-sektor penting, sedangkan pihak swasta dapat melakukan kegiatan usaha di luar sektor-sektor penting. Pemerintah menerapkan sistem demokrasi ekonomi yang bertujuan untuk menciptakan keadilan sosial. Barang-barang yang dianggap penting bagi kelangsungan negara dan dibutuhkan orang banyak tidak diberikan kepada pihak swasta.

Melalui teori Adam Smith, mengemukakan bahwa pemerintah hanya mempunyai tiga fungsi, yaitu fungsi pemerintah untuk memelihara pertahanan dan keamanan negara, fungsi pemerintah untuk melaksanakan keadilan, dan fungsi pemerintah untuk menyediakan barang-barang yang tidak disediakan oleh sektor swasta (Karis, 2020). Peran pemerintah dalam hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan demokrasi diantaranya:

- a. Penciptaan kebijakan yang efektif dimana pemerintah bertanggung jawab untuk merumuskan dan menerapkan kebijakan yang mendukung pertumbuhan ekonomi. Kebijakan ini harus mencakup investasi dalam infrastruktur, pendidikan, dan teknologi, yang semuanya berkontribusi pada peningkatan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi
- b. Menjamin stabilitas politik yang dihasilkan dari pemerintahan yang demokratis dapat menciptakan lingkungan yang kondusif bagi investasi dan pertumbuhan ekonomi. Ketika masyarakat merasa terlibat dalam proses politik dan memiliki

hak-hak sipil yang dilindungi, mereka lebih cenderung untuk berinvestasi dalam ekonomi

- c. Pengaturan hak milik dan perlindungan hak asasi manusia, pemerintah harus menjamin hak milik dan perlindungan hak asasi manusia, yang merupakan elemen penting dalam demokrasi. Ini menciptakan kepercayaan di kalangan investor dan masyarakat, yang pada gilirannya dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi
- d. Mendorong partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan sangat penting dimana pemerintah harus menciptakan mekanisme akuntabilitas dan transparansi yang memungkinkan masyarakat untuk terlibat dalam proses pemerintahan, yang dapat meningkatkan kualitas kebijakan dan hasil ekonomi.
- e. Dalam beberapa kasus, intervensi pemerintah dalam ekonomi mungkin diperlukan untuk mencapai pertumbuhan yang berkelanjutan. Ini termasuk pengaturan pasar, dukungan untuk industri tertentu, dan kebijakan redistributif untuk mengurangi ketimpangan.

Secara keseluruhan, pemerintah memiliki peran kunci dalam menciptakan kondisi yang mendukung baik pertumbuhan ekonomi maupun pengembangan demokrasi, dan keduanya saling mempengaruhi satu sama lain.

2.2 Pertumbuhan Ekonomi

2.2.1 Definisi Pertumbuhan Ekonomi

Menurut *World Bank* (2023), pertumbuhan ekonomi adalah kondisi saat masyarakat suatu wilayah atau negara mengalami peningkatan pendapatan karena adanya kenaikan produksi barang dan jasa. Pertumbuhan ekonomi ini penting dihitung setiap tahunnya karena dapat digunakan sebagai indikator keberhasilan pembangunan ekonomi di masyarakat. Secara umum dipahami bahwa pertumbuhan ekonomi merupakan hasil dari berbagai kegiatan investasi yang dapat membenahi kualitas modal, peningkatan kuantitas sumber daya produktif, dan produktivitas sumber daya melalui penemuan yang baru, inovasi dan kemajuan teknologi (Todaro & Smith, 2012).

Indikator utama pada pertumbuhan ekonomi adalah Produk Domestik Bruto (PDB) perkapita yaitu rata-rata nilai total produksi barang dan jasa akhir yang dihasilkan dalam suatu negara dalam periode tertentu. Pertumbuhan ekonomi yang stabil biasanya diiringi dengan peningkatan pendapatan per kapita, yang berdampak pada peningkatan standar hidup masyarakat. Pertumbuhan ekonomi yang stabil menarik investor untuk menanamkan modalnya, sehingga mendorong pertumbuhan lebih lanjut.

2.3 Good governance

Good governance atau tata kelola pemerintahan yang baik adalah prinsip dan praktik dalam mengelola kekuasaan dan sumber daya publik untuk mencapai kesejahteraan masyarakat secara transparan, akuntabel, dan partisipatif (Worldbank, 2024). Komponen utama dari *good governance* melibatkan berbagai dimensi, yang dijelaskan lebih rinci sebagai berikut:

2.3.1 *Voice and Accountability* (Suara dan Akuntabilitas)

Suara dan akuntabilitas menangkap persepsi tentang sejauh mana warga negara dapat berpartisipasi dalam memilih pemerintah, serta kebebasan berekspresi, kebebasan berserikat, dan media yang bebas. Dimensi ini mencerminkan sejauh mana masyarakat dapat menyuarakan pendapatnya, berpartisipasi dalam proses politik, dan memiliki kebebasan berbicara. Akuntabilitas mengacu pada kemampuan institusi pemerintah untuk bertanggung jawab atas kebijakan dan tindakan yang diambil, sehingga masyarakat merasa terlibat dalam proses pengambilan keputusan.

2.3.2 *Political Stability and Absence of Violence/Terrorism* (Stabilitas Politik dan Ketiadaan Kekerasan/Terrorisme)

Stabilitas Politik dan Ketiadaan Kekerasan/Terrorisme mengukur persepsi tentang kemungkinan ketidakstabilan politik dan/atau kekerasan yang dimotivasi oleh politik, termasuk terorisme. Stabilitas politik adalah faktor kunci dalam menciptakan lingkungan yang mendukung investasi dan pembangunan ekonomi.

Ketidakhadiran kekerasan atau ancaman terorisme memberikan rasa aman bagi investor dan pelaku ekonomi untuk menjalankan aktivitas bisnis tanpa gangguan

2.3.3 *Government Effectiveness* (Efektivitas Pemerintah)

Efektivitas pemerintah mencakup persepsi tentang kualitas pelayanan publik, kualitas pegawai negeri sipil dan tingkat kemandiriannya dari tekanan politik, kualitas perumusan dan pelaksanaan kebijakan, dan kredibilitas komitmen pemerintah terhadap kebijakan-kebijakan tersebut. Efektivitas pemerintah melibatkan kapasitas birokrasi dalam menyusun dan melaksanakan kebijakan publik secara efisien, yang pada gilirannya meningkatkan kepercayaan masyarakat dan investor terhadap pemerintah.

2.3.4 *Regulatory Quality* (Kualitas Peraturan)

Kualitas peraturan menangkap persepsi tentang kemampuan pemerintah untuk merumuskan dan menerapkan kebijakan dan peraturan yang baik yang mengizinkan dan mendorong pengembangan sektor swasta. Kualitas regulasi dirancang untuk mendorong pertumbuhan ekonomi serta melindungi hak-hak pelaku usaha dengan menciptakan iklim bisnis yang kompetitif dan mendorong inovasi.

2.3.5 *Rule of Law* (Aturan Hukum)

Aturan hukum menangkap persepsi tentang sejauh mana para pelaku memiliki kepercayaan dan mematuhi aturan-aturan masyarakat, dan khususnya kualitas penegakan kontrak, hak milik, polisi, dan pengadilan, serta kemungkinan terjadinya kejahatan dan kekerasan. Dalam konteks ini, *good governance* memastikan bahwa semua pihak, termasuk pemerintah, tunduk pada hukum yang berlaku. Penegakan hukum yang kuat menciptakan kepercayaan terhadap sistem hukum dan mendorong investasi.

2.3.6 *Control of Corruption* (Pengendalian Korupsi)

Pengendalian korupsi menangkap persepsi tentang sejauh mana kekuasaan publik digunakan untuk kepentingan pribadi, termasuk bentuk-bentuk korupsi kecil dan besar, serta “perebutan” negara oleh elit dan kepentingan swasta. Bentuk korupsi, serta “penguasaan” negara oleh para elit dan kepentingan pribadi. Korupsi adalah

hambatan utama dalam pembangunan ekonomi. Pengendalian korupsi merupakan elemen penting dari *good governance* karena korupsi dapat mengikis kepercayaan masyarakat, menghambat alokasi sumber daya yang efisien, dan melemahkan daya saing ekonomi.

2.4 Pengeluaran Pemerintah

Pengeluaran pemerintah termasuk pengeluaran pemerintah yang digunakan untuk infrastruktur umum dan layanan publik yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Pengeluaran pemerintah didefinisikan sebagai alokasi dana untuk penciptaan dan pemeliharaan infrastruktur dan layanan yang meningkatkan stok modal suatu negara. Pengeluaran pemerintah berkontribusi pada stok modal nasional, yang mengarah pada peningkatan produktivitas dan peningkatan standar hidup (Danaj & Reçi, 2024). Bentuk dari pengeluaran pemerintah seperti investasi dalam infrastruktur, sosial, lingkungan, teknologi, dan pertanian. Dalam penelitian Scandizzo & Pierleoni (2020) menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah menghasilkan efek pertumbuhan yang lebih tinggi dibandingkan dengan konsumsi publik, meningkatkan sisi permintaan dan penawaran ekonomi.

Tujuan dari pengeluaran pemerintah adalah untuk meningkatkan infrastruktur yang mendukung pertumbuhan ekonomi, menyediakan layanan publik yang lebih baik untuk masyarakat terutama di daerah terpencil, dan mendorong kesejahteraan masyarakat melalui akses yang lebih baik pada fasilitas dan layanan. Setiap bentuk pengeluaran pemerintah memiliki tujuan dan dampak yang berbeda, namun tujuannya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan. Dalam Pengeluaran Pemerintah, terdapat beberapa analisis yang dilakukan untuk menentukan kelayakan, manfaat dan dampak dari proyek investasi yang direncanakan oleh pemerintah. Tujuan utama analisis pengeluaran pemerintah adalah untuk memastikan bahwa sumber daya publik digunakan secara efektif dan efisien untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Berikut adalah metode yang umum digunakan untuk analisis Pengeluaran Pemerintah:

1. Analisis biaya dan manfaat (*cost-benefit analysis* – CBA)

Metode ini membandingkan total biaya royek dengan total manfaat yang diharapkan. Jika manfaat lebih besar daripada biaya, proyek dianggap layak. Metode CBA juga melibatkan diskonto untuk menghitung nilai sekarang dari manfaat dan biaya di masa depan.

2. Analisis kelayakan proyek (*feasibility study*)

Metode ini meliputi analisis teknis, ekonomi, sosial, dan lingkungan untuk menentukan proyek dapat dilaksanakan atau tidak, dengan mempertimbangkan faktor-faktor seperti lokasi, teknologi yang digunakan, dan dampak sosial.

3. Analisis sensitivitas

Metode ini menguji bagaimana perubahan dalam asumsi dasar (seperti biaya, pendapatan, dan tingkat diskonto) dapat mempengaruhi hasil analisis. Metode ini membantu mengidentifikasi risiko dan ketidakpastian yang terkait dengan proyek.

4. Analisis multi kriteria (*multi criteria analysis*- MCA)

Digunakan ketika keputusan tidak hanya didasarkan pada biaya dan manfaat ekonomi, tetapi juga mempertimbangkan aspek sosial, lingkungan, dan politik. Metode ini menggunakan berbagai kriteria untuk mengevaluasi proyek dan membantu dalam pengambilan keputusan yang lebih holistik.

5. Analisis keberlanjutan

Analisis ini menilai dampak jangka panjang dari proyek terhadap lingkungan dan masyarakat, dengan memastikan bahwa proyek tidak hanya menguntungkan secara ekonomi, tetapi juga berkelanjutan secara sosial dan lingkungan.

Faktor yang dapat mempengaruhi analisis pengeluaran pemerintah adalah kondisi ekonomi seperti inflasi, tingkat suku bunga dan pertumbuhan ekonomi dapat

mempengaruhi tingkat biaya dan manfaat proyek. Selain itu, kebijakan pemerintah termasuk fiskal dan regulasi dapat mempengaruhi kelayakan dan pelaksanaan proyek.

Selanjutnya, dalam analisis investasi publik terdapat tantangan yang terkadang dapat menghambat jalannya pengeluaran pemerintah diantaranya Keterbatasan data yang akurat dan relevan dapat menghambat analisis yang tepat. Ketidakpastian dalam proyeksi ekonomi dan sosial dapat mempengaruhi hasil analisis, serta praktik korupsi dapat merusak integritas analisis dan mengurangi manfaat proyek.

2.5 Foreign Direct Investment

Foreign Direct Investment (FDI) merupakan investasi yang dilakukan oleh individu atau perusahaan swasta yang menjadi salah satu komponen penting dalam perekonomian suatu negara. Jenis investasi ini mencakup aktivitas pembiayaan yang dilakukan oleh sektor swasta, baik oleh individu maupun oleh perusahaan untuk mendapat keuntungan, dalam rangka meningkatkan kapasitas produksi dan mendukung pertumbuhan ekonomi. FDI dapat berbentuk investasi langsung, saham atau obligasi, R&D untuk penelitian dan pengembangan yang melibatkan penanaman modal dari investor asing ke negara tertentu, serta investasi domestik yang dilakukan oleh pelaku usaha dalam negeri. Bentuk FDI ini dapat mencakup pembangunan fasilitas produksi, pengadaan infrastruktur, hingga investasi pada inovasi teknologi. Kontribusi FDI terhadap pertumbuhan ekonomi terlihat dari dampaknya terhadap penciptaan lapangan kerja, peningkatan produktivitas, dan transfer teknologi. Selain itu, keberhasilan FDI sangat bergantung pada stabilitas politik, keberadaan regulasi yang mendukung, serta efektivitas tata kelola pemerintahan yang mendorong terciptanya iklim investasi yang kondusif.

Beberapa faktor yang mempengaruhi keputusan FDI meliputi tingkat suku bunga dimana suku bunga yang rendah cenderung mendorong investasi karena biaya pinjaman menjadi lebih murah. Jika perusahaan percaya bahwa ekonomi akan tumbuh, mereka lebih cenderung untuk berinvestasi. Kebijakan pemerintah termasuk kebijakan fiskal dan moneter, insentif pajak, dan regulasi dapat mempengaruhi keputusan investasi. Selain itu, stabilitas politik dan ekonomi karena

lingkungan yang stabil meningkatkan kepercayaan investor. Selanjutnya ketersediaan modal dan kemudahan akses ke pembiayaan dapat mempengaruhi keputusan investasi.

2.6 Teori Penelitian

2.6.1 Teori Pertumbuhan Ekonomi

1) Teori Solow

Dalam buku Mankiw & Gregory (2003) menyatakan Teori Solow, secara formal dikenal sebagai model Solow-Swan, adalah kerangka dasar dalam ekonomi neoklasik yang menjelaskan pertumbuhan ekonomi jangka panjang melalui akumulasi modal, pertumbuhan tenaga kerja atau populasi, dan kemajuan teknologi. Diperkenalkan oleh Robert Solow pada tahun 1956, model ini berfokus pada peran modal fisik dan teknologi dalam meningkatkan output ekonomi. Berikut adalah model Solow:

$$Y = f(K, L, T)$$

$$Y = K^{\alpha} (A \cdot L)^{1-\alpha}$$

Dimana:

Y: Tingkat pertumbuhan ekonomi

K: Tingkat pertumbuhan modal

L: Tingkat pertumbuhan tenaga kerja

T: Tingkat pertumbuhan teknologi

A: Elastisitas output terhadap modal

Model menyatakan bahwa peningkatan stok modal mengarah pada output yang lebih tinggi, dengan pengembalian modal yang berkurang dari waktu ke waktu. Model Solow menunjukkan bahwa ekonomi akan mencapai titik keseimbangan (*steady state*) di mana pertumbuhan output per kapita stabil. Pada titik ini, investasi dalam modal baru sama dengan depresiasi modal yang ada.

2) Teori Pertumbuhan Endogen (Ekonomi Baru)

Teori endogen adalah sebuah kerangka pemikiran dalam ekonomi yang berusaha menjelaskan bagaimana pertumbuhan ekonomi dapat terjadi secara berkelanjutan dari dalam suatu sistem ekonomi. Teori ini dikembangkan oleh beberapa ekonom yakni domar yang menekankan peran teknologi dan pengetahuan sebagai kunci pertumbuhan ekonomi, dan juga Robert Lucas yang menggabungkan model teori modal manusia dengan teori pertumbuhan. Teori ini mulai berkembang pada akhir tahun 1980an yang merupakan paradigma baru dalam memahami pertumbuhan ekonomi dan perkembangan dari hasil kritik teori neoklasik dimana Paul dan Robert mengkritik model pertumbuhan Solow melalui penjelasannya mengenai kunci utama pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang (Wijayanto, 2019). Teori pertumbuhan endogen berpendapat bahwa pertumbuhan ekonomi didorong oleh faktor-faktor internal yang dapat dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah dan tindakan pelaku ekonomi. Konsep dasar dari teori endogen bukan hanya sekadar hasil dari akumulasi modal fisik dan tenaga kerja, tetapi juga berasal dari inovasi, peningkatan pengetahuan melalui R&D, dan pengembangan teknologi yang terjadi di dalam suatu ekonomi. Dalam teori ini pemerintah memiliki peran penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi melalui kebijakan yang mendukung inovasi, investasi dalam infrastruktur dan pendidikan.

2.6.2 Teori Fiskal (Pengeluaran Pemerintah)

1) Teori Keynesian

Teori Keynesian, yang diperkenalkan oleh ekonom Inggris John Maynard Keynes pada era 1930-an, merupakan salah satu fondasi utama dalam pemikiran ekonomi modern, terutama dalam hal peran aktif pemerintah dalam perekonomian. Dalam buku Mankiw (2009) teori ini menekankan bahwa pengeluaran pemerintah yang produktif dapat meningkatkan permintaan agregat, yang pada gilirannya mendorong pertumbuhan ekonomi dan

menurunkan pengangguran, terutama dalam jangka pendek ketika pasar mengalami ketidakseimbangan seperti resesi atau krisis.

Keynes berpendapat bahwa mekanisme pasar tidak selalu mampu menyeimbangkan permintaan dan penawaran secara otomatis. Dalam kondisi krisis, sektor swasta cenderung menahan konsumsi dan investasi, yang menyebabkan penurunan permintaan agregat (Aruan, et.al, 2023). Karenanya, intervensi pemerintah melalui pengeluaran publik menjadi sangat penting untuk mengisi kekosongan permintaan tersebut. Pengeluaran pemerintah dalam kerangka Keynesian biasanya diarahkan pada proyek-proyek produktif seperti pembangunan infrastruktur, pendidikan, layanan kesehatan, dan sektor publik lainnya. Proyek-proyek ini tidak hanya menciptakan lapangan kerja langsung, tetapi juga menstimulasi peningkatan pendapatan masyarakat yang kemudian mendorong konsumsi dan investasi lanjutan (Wahyudi, 2020). Efek ini dikenal sebagai efek multiplier, di mana setiap rupiah yang dibelanjakan pemerintah menghasilkan peningkatan pendapatan nasional yang lebih besar dari nilai awalnya.

Namun, efektivitas kebijakan fiskal dalam teori Keynesian cenderung lebih dominan dalam jangka pendek. Dalam jangka panjang, terlalu bergantung pada belanja pemerintah berpotensi menimbulkan masalah fiskal seperti defisit anggaran, inflasi, dan *crowding out*, yaitu kondisi ketika pengeluaran pemerintah yang tinggi justru mengurangi investasi swasta karena naiknya suku bunga atau terbatasnya akses ke pembiayaan (Aruan, et.al, 2023). Secara empiris, beberapa penelitian lokal seperti di Daerah Istimewa Yogyakarta menunjukkan bahwa peningkatan pengeluaran pemerintah secara langsung berkontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi daerah, mendukung hipotesis utama teori Keynesian. Dengan demikian, dalam kerangka teori Keynesian, pengeluaran pemerintah berperan sebagai alat kebijakan fiskal utama untuk merangsang aktivitas ekonomi, terutama saat sektor swasta tidak cukup kuat untuk menggerakkan perekonomian secara optimal. Teori ini tetap

relevan hingga kini, khususnya dalam konteks pemulihan ekonomi pasca-pandemi dan respon terhadap krisis global lainnya.

2) Teori Wagner

Teori Wagner atau hukum Wagner yang dikenal dengan “*The Law of Expanding State Expenditure*” dikemukakan oleh Adolph Wagner pada tahun 1863, yang berdasarkan pengamatan empiris di negara-negara maju seperti Jerman, Amerika Serikat, dan Jepang. Wagner menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi yang ditandai dengan meningkatnya pendapatan per kapita akan meningkatkan pengeluaran pemerintah, baik secara absolut maupun relatif terhadap produk nasional bruto (Mankiw N. G., 2009). Peningkatan ini disebabkan oleh beberapa faktor, dimana seiring meningkatnya pendapatan, masyarakat menuntut lebih banyak barang dan jasa publik seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Kedua, peran pemerintah semakin luas dalam mengatur hubungan sosial dan ekonomi, termasuk perlindungan sosial, keamanan, dan pertahanan negara. Ketiga, perkembangan demokrasi serta kompleksitas birokrasi dan administrasi publik juga turut mendorong peningkatan belanja negara (Surgawati, 2020).

Wagner secara matematis menyatakan bahwa rasio pengeluaran pemerintah per kapita terhadap pendapatan per kapita cenderung meningkat dari waktu ke waktu, mencerminkan tren jangka panjang pertumbuhan belanja pemerintah sebagai bagian dari pertumbuhan ekonomi nasional. Meski demikian, teori ini memiliki keterbatasan karena tidak menjelaskan secara eksplisit batas optimal pengeluaran pemerintah maupun mekanisme alokasi belanja berdasarkan kebutuhan publik. Selain itu, Wagner’s Law lebih menekankan hubungan satu arah, yaitu dari pertumbuhan ekonomi ke pengeluaran pemerintah

2.6.3 Teori Investasi

1. *Dunning Eclectic Paradigm (OLI Framework)*

Dunning's Eclectic Paradigm atau dikenal sebagai *OLI Framework*, merupakan teori komprehensif yang dikembangkan oleh John H. Dunning pada tahun 1979 untuk menjelaskan alasan dan mekanisme perusahaan melakukan *Foreign Direct Investment* (FDI). Model ini sangat relevan untuk menganalisis arus FDI ke kawasan ASEAN, khususnya dalam konteks hubungan antara kualitas tata kelola (*good governance*), kebijakan ekonomi, dan daya tarik investasi asing. OLI adalah akronim dari tiga komponen utama yang harus dipenuhi oleh perusahaan agar FDI menjadi strategi yang rasional yaitu *Ownership*, *Location*, dan *Internalization*.

- a. *Ownership advantages* (keunggulan kepemilikan) mencakup aset atau kapabilitas spesifik perusahaan seperti teknologi, hak kekayaan intelektual, reputasi merek, serta keahlian manajerial. Keunggulan ini memberikan perusahaan kemampuan untuk bersaing dengan perusahaan lokal di negara tujuan dan mengatasi tantangan "*liability of foreignness*" atau keterbatasan sebagai entitas asing (Chen, 2019).
- b. *Location advantages* (keunggulan lokasi) merujuk pada daya tarik suatu negara sebagai tujuan investasi. Faktor-faktor seperti ketersediaan sumber daya alam, biaya tenaga kerja yang kompetitif, stabilitas politik, kebijakan pemerintah yang mendukung, dan infrastruktur yang memadai menjadi pertimbangan utama (Batheories, 2024). Dalam konteks ASEAN, negara-negara dengan tata kelola pemerintahan yang baik, seperti transparansi dan kepastian hukum, cenderung lebih menarik bagi investor asing.
- c. *Internalization advantages* atau keunggulan internalisasi, dalam *Corporate Finance Institute* (2023) menjelaskan mengapa perusahaan memilih untuk mengelola sendiri operasinya di luar negeri daripada melakukan lisensi atau kemitraan. Internalisasi membantu menjaga

kontrol atas teknologi, kualitas produk, dan mengurangi risiko kebocoran pengetahuan atau biaya transaksi yang tinggi

Dalam konteks ASEAN, *OLI Framework* dapat digunakan untuk menjelaskan mengapa beberapa negara berhasil menarik FDI lebih banyak dibandingkan yang lain. Negara dengan *good governance*, biaya produksi rendah, serta lingkungan bisnis yang stabil cenderung memenuhi komponen “L” dan “I”, sehingga meningkatkan daya tarik FDI yang membawa modal, teknologi, dan keahlian manajerial yang mendukung pertumbuhan ekonomi kawasan.

2. Harrod-Domar

Teori Harrod-Domar adalah model ekonomi yang menjelaskan hubungan antara investasi, tabungan, dan pertumbuhan ekonomi. Dikembangkan oleh Roy Harrod dan Evsey Domar pada tahun 1947, teori ini menekankan bahwa investasi memiliki peran kunci dalam mendorong pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Model ini didasarkan pada asumsi bahwa tabungan masyarakat merupakan sumber utama dana untuk investasi. Teori ini menekankan bahwa investasi menghasilkan akumulasi modal yang meningkatkan kapasitas produksi (Todaro, 2006).

Persamaan utama dalam teori ini adalah:

$$g = \frac{S}{k}$$

Dimana:

G : Tingkat pertumbuhan ekonomi

S : Rasio tabungan terhadap pendapatan nasional,

K : Rasio modal-*output*.

Dengan kata lain, tingkat pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh tingkat tabungan dan efisiensi penggunaan modal. Teori Harrod-Domar sering digunakan dalam konteks pembangunan ekonomi di negara berkembang, di mana peningkatan tabungan dan investasi diperlukan untuk mencapai pertumbuhan yang berkelanjutan. Meskipun sederhana, model ini memberikan dasar penting dalam analisis pertumbuhan ekonomi.

2.7 Hubungan Antar Variabel

2.7.1 Hubungan *Good Governance* dan Pertumbuhan Ekonomi

Good governance berperan penting dalam menciptakan lingkungan yang kondusif untuk pertumbuhan ekonomi. *Good governance* mencakup prinsip-prinsip seperti transparansi, akuntabilitas, partisipasi, dan penegakan hukum yang baik. Ketika pemerintah menerapkan praktik *good governance* yang baik, hal ini dapat meningkatkan kepercayaan investor, baik domestik maupun asing, untuk berinvestasi di negara tersebut. Praktik *good governance* yang baik juga dapat mengurangi korupsi dan meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan sumber daya publik. Dengan demikian, negara yang memiliki tingkat *good governance* yang tinggi cenderung mengalami pertumbuhan ekonomi yang lebih baik. Penelitian menunjukkan bahwa terdapat hubungan positif antara indikator *good governance* dan pertumbuhan ekonomi, di mana peningkatan dalam kualitas *good governance* berkontribusi pada peningkatan PDB dan kesejahteraan masyarakat.

2.7.2 Hubungan Pengeluaran Pemerintah dan Pertumbuhan Ekonomi

Pengeluaran pemerintah memiliki peran yang sangat penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi suatu negara. Pengeluaran pemerintah mencakup pengeluaran pemerintah untuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan layanan publik lainnya. Ketika pemerintah mengalokasikan dana untuk proyek-proyek infrastruktur, seperti pembangunan jalan, jembatan, dan fasilitas transportasi, hal ini dapat meningkatkan konektivitas dan efisiensi dalam perekonomian. Peningkatan infrastruktur yang baik tidak hanya menciptakan lapangan kerja selama fase konstruksi, tetapi juga meningkatkan produktivitas jangka panjang dengan memfasilitasi pergerakan barang dan orang. Selain itu,

pengeluaran pemerintah dalam pendidikan dan kesehatan dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia, yang merupakan faktor kunci dalam pertumbuhan ekonomi. Dengan demikian, terdapat hubungan positif yang signifikan antara tingkat pengeluaran pemerintah dan pertumbuhan ekonomi, di mana peningkatan pengeluaran pemerintah cenderung diikuti oleh peningkatan dalam Produk Domestik Bruto (PDB) dan kesejahteraan masyarakat.

2.7.3 Hubungan FDI dan Pertumbuhan Ekonomi

FDI juga memainkan peran krusial dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. FDI mencakup alokasi sumber daya oleh individu dan perusahaan untuk memperoleh aset atau mengembangkan proyek dengan harapan mendapatkan keuntungan. Ketika sektor swasta berinvestasi dalam bisnis baru, ekspansi, atau inovasi, hal ini dapat menciptakan lapangan kerja baru dan meningkatkan daya saing ekonomi. FDI sering kali lebih responsif terhadap perubahan pasar dan kebutuhan konsumen, sehingga dapat mendorong inovasi dan efisiensi. Selain itu, FDI yang tinggi dapat menarik lebih banyak investasi asing langsung (FDI), yang pada gilirannya dapat memperkuat pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, terdapat hubungan positif antara tingkat FDI dan pertumbuhan ekonomi, di mana peningkatan FDI berkontribusi pada peningkatan PDB dan penciptaan lapangan kerja.

2.8 Penelitian Terdahulu

No	Penulis	Judul	Hasil
1.	Vu, et.al. (2024)	<i>Impact of Public Investment Governance on Provinces Economic Growth: A Spatial Approach</i>	Pengeluaran pemerintah berdampak positif pada pertumbuhan ekonomi di Vietnam. Peningkatan pengeluaran pemerintah meningkatkan GRDP secara signifikan. Investasi asing langsung juga berkontribusi positif terhadap pertumbuhan

			regional. Kebijakan provinsi meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui Pengeluaran Pemerintah.
2.	Ahamed, F. (2023)	<i>Impact of Public and Private Investments on Economic Growth of Developing Countries</i>	<p>Pengeluaran pemerintah berdampak positif pada pertumbuhan ekonomi lebih dari FDI dengan pembentukan modal kotor secara signifikan berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi.</p> <p>Pengeluaran konsumsi pemerintah berdampak negatif pada pertumbuhan PDB. Kredit swasta domestik memiliki efek positif tetapi tidak signifikan. Investasi asing langsung berbanding terbalik dengan pertumbuhan ekonomi, tetapi tidak signifikan</p>
3.	Wong, et.al., (2022)	<i>Good governance and Sustainable Investment: The Effects of Governance Indicators on Stock Market Returns</i>	<p>Tata kelola yang lebih baik mengarah pada pengembalian pasar saham yang lebih tinggi. Stabilitas politik secara positif mempengaruhi pengembalian investasi berkelanjutan. Kualitas peraturan secara positif mempengaruhi</p>

			pengembalian investasi berkelanjutan. Pengendalian korupsi berdampak negatif pada pengembalian investasi berkelanjutan Kontrol korupsi yang tidak memadai menurunkan pengembalian pasar saham.
4.	Fathia, S.N. (2021)	<i>How Good Government Governance Affect the Economic Growth? An Investigation on Selected Country around the World</i>	Suara dan akuntabilitas berdampak negatif pada pertumbuhan ekonomi. Efektivitas pemerintah secara positif mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Stabilitas politik, kualitas peraturan, dan pengendalian korupsi tidak berpengaruh. Efektivitas pemerintah secara signifikan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi secara positif
5.	Turan, et. Al., (2021)	<i>Economic Growth Effectss of Public And Private Investment: Evidence from Dynamic Panel Estimation For Developed And Developing Countries</i>	Pengeluaran pemerintah dan swasta secara positif mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Dampak pengeluaran pemerintah umumnya lebih besar daripada FDI. Pertumbuhan persisten dari waktu ke waktu sesuai dengan

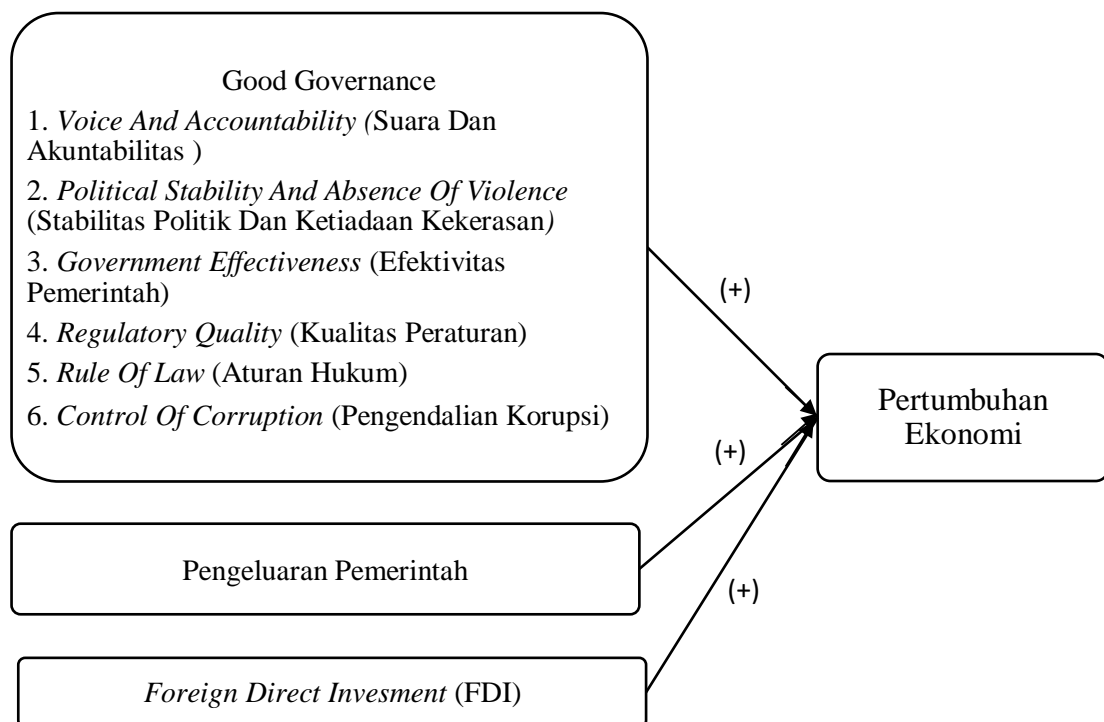
			tingkat pertumbuhan yang tertinggal. PDB awal berdampak negatif pada pertumbuhan di negara berkembang
6.	Nguyen, (2020)	<i>Governance Environment and the Public Investment – Private Investment Relationship</i>	Penelitian ini menunjukkan bahwa lingkungan tata kelola pemerintah berperan penting dalam memfasilitasi hubungan antara pengeluaran pemerintah dan FDI. Penelitian ini menemukan bahwa peningkatan pengeluaran pemerintah dapat mendorong FDI, terutama di negara-negara dengan sistem tata kelola yang kuat. Selain itu, faktor-faktor seperti transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan juga berkontribusi terhadap efektivitas investasi.
7.	Khouya, M.& Benabdelhadi, A. (2020)	<i>Good governance and its impact on economic development: A systematic literature review.</i>	Studi ini menyimpulkan bahwa tata kelola pemerintah memiliki efek positif pada pertumbuhan ekonomi. Temuan ini juga mengungkapkan bahwa investasi asing langsung (FDI)

			secara positif mempengaruhi ketidaksetaraan pendapatan tetapi memiliki dampak yang dapat diabaikan pada pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan.
8.	Unnikrishnan, N. & Kattookaran, T.P. (2020)	<i>Impact of Public and Private Infrastructure Investment on Economic Growth: Evidence From India</i>	<p>Baik pengeluaran pemerintah maupun swasta berdampak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. FDI memberikan dorongan yang lebih baik daripada Pengeluaran Pemerintah. FDI menunjukkan volatilitas yang lebih besar daripada Pengeluaran Pemerintah. Hal ini karena FDI sensitif terhadap kondisi ekonomi makro dan PDB merespons lebih aktif terhadap guncangan FDI</p>
9.	Canh & Phong., (2017)	<i>The Linkage between Public, Private Investment and Economic Growth Evidence for the Developing ASEAN and Asian Countries</i>	<p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara Pengeluaran Pemerintah, FDI, dan pertumbuhan ekonomi di negara-negara berkembang di Asia, termasuk negara-negara ASEAN. Hasil analisis menunjukkan bahwa</p>

pengeluaran pemerintah dapat mempengaruhi FDI, dan sebaliknya, dengan perbedaan yang signifikan antara negara-negara ASEAN dan non-ASEAN.

Dalam penelitian terdahulu terletak pada cakupan variabel, metode, serta wilayah dan periode analisis. Penelitian sebelumnya umumnya hanya membahas sebagian variabel, seperti hubungan FDI dan pertumbuhan ekonomi, tanpa mempertimbangkan peran *good governance*. Selain itu, metode yang digunakan dalam mengukur keterkaitan antar variabel secara komprehensif. Dalam penelitian ini memperluas analisis pada negara-negara ASEAN dalam jangka waktu lebih panjang yang bertujuan untuk menjelaskan hasil studi sebelumnya yang bertentangan, khususnya terkait dampak pengeluaran pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi dikawasan negara berkembang ASEAN.

2.9 Kerangka Berpikir



2.10 Hipotesis

H1: Diduga *good governance* pada indikator suara dan akuntabilitas berpengaruh positif signifikan pada pertumbuhan ekonomi

H2: Diduga *good governance* indikator stabilitas politik dan ketiadaan kekerasan/terorisme berpengaruh positif signifikan pada pertumbuhan ekonomi

H3: Diduga *good governance* indikator efektivitas pemerintah berpengaruh positif signifikan pada pertumbuhan ekonomi

H4: Diduga *good governance* indikator kualitas peraturan berpengaruh positif signifikan pada pertumbuhan ekonomi

H5: Diduga *good governance* indikator aturan hukum berpengaruh positif signifikan pada pertumbuhan ekonomi

H6: Diduga *good governance* indikator pengendalian korupsi berpengaruh positif signifikan pada pertumbuhan ekonomi

H7: Diduga pengeluaran pemerintah berpengaruh positif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di ASEAN

H8: Diduga FDI berperan berpengaruh positif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di ASEAN

III. METODE PENELITIAN

3.1 Jenis dan Ruang Lingkup Penelitian

3.1.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif bertujuan untuk menguji hipotesis yang telah dirumuskan sebelumnya dan menghasilkan data numerik yang dapat dianalisis menggunakan teknik statistik (Creswell, 2014). Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi hubungan antara variabel-variabel yang diteliti, sehingga dapat memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai pertumbuhan ekonomi di ASEAN

3.1.2. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian adalah batasan-batasan atau cakupan yang ditetapkan dalam sebuah penelitian. Penelitian ini menggunakan data dari tahun 1996-2023 pada negara berkembang di kawasan ASEAN, diantaranya Filipina, Indonesia, Kamboja, Laos, Malaysia Thailand, Vietnam. Pertimbangan dalam pemilihan rentang waktu ini karena penelitian akan berfokus pada pengaruh kualitas *good governance* dan perkembangan investasi negara berkembang ASEAN, dengan ruang lingkup penelitian ini diharapkan dapat memberikan kerangka pemikiran yang jelas dan meningkatkan validitas temuan dengan mengurangi potensi bias serta memberikan konteks yang spesifik.

3.2 Data dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari publikasi-publikasi resmi yang kredibel dan relevan. Data sekunder adalah data yang dikumpulkan dari publikasi resmi dan diolah untuk keperluan penelitian. Berikut adalah daftar variabel dan sumber yang digunakan dalam penelitian:

Tabel 3.1 Sumber Data Penelitian

Varibel	Simbol	Satuan	Periode	Sumber
Pertumbuhan Ekonomi	PE	Persen (%)	Tahunan	Worldbank
<i>Voice and Accountability</i>	VA	Point	Tahunan	WGI
<i>Political Stability and Absence of Violence</i>	PS	Point	Tahunan	WGI
<i>Government Effectiveness</i>	GE	Point	Tahunan	WGI
<i>Regulatory Quality</i>	RQ	Point	Tahunan	WGI
<i>Rule of Law</i>	RL	Point	Tahunan	WGI
<i>Control of Corruption</i>	CC	Point	Tahunan	WGI
Pengeluaran Pemerintah	I.P	Persen (%)	Tahunan	WDI
FDI	FDI	Persen (%)	Tahunan	WDI

3.3 Definisi Operasional

3.3.1. Pertumbuhan Ekonomi

Menurut *Worldbank* (2023), pertumbuhan ekonomi adalah peningkatan kapasitas produksi suatu negara yang diukur melalui pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) riil dalam periode tertentu. Pertumbuhan ekonomi secara operasional didefinisikan sebagai peningkatan kapasitas suatu perekonomian dalam memproduksi barang dan jasa dalam jangka waktu tertentu, yang biasanya diukur melalui perubahan Produk Domestik Bruto (PDB) riil. Pertumbuhan ekonomi dapat diukur dengan persentase kenaikan PDB dari tahun ke tahun, di mana peningkatan ini mencerminkan ekspansi aktivitas ekonomi suatu negara atau wilayah. Rumus untuk menghitung *GDP Growth* (Annual %) atau pertumbuhan tahunan Produk Domestik Bruto (PDB) adalah sebagai berikut:

$$GDP\ Growth\ (\%) = \frac{GDP_t - GDP_{t-1}}{GDP_{t-1}} \times 100$$

Di mana:

GDP_t = PDB pada tahun berjalan

GDP_{t-1} = PDB pada tahun sebelumnya

3.3.2. *Good governance*

Menurut *Worldbank*, *good governance* atau tata kelola pemerintahan yang baik adalah konsep yang mencerminkan efektivitas, transparansi, akuntabilitas, partisipasi, dan supremasi hukum dalam pengelolaan administrasi publik dan kebijakan pemerintahan. *Good governance* diukur melalui beberapa indikator utama yang dikembangkan oleh organisasi internasional seperti *World Bank*, antara lain:

1. *Voice and Accountability*, mengukur sejauh mana warga negara dapat berpartisipasi dalam memilih pemerintah dan memiliki kebebasan berbicara serta kebebasan media.
2. *Political Stability and Absence of Violence*, mengukur tingkat stabilitas politik dan tidak adanya kekerasan atau terorisme yang mengganggu pemerintahan.
3. *Government Effectiveness*, mengukur efisiensi pemerintahan dalam menyusun kebijakan dan memberikan pelayanan publik yang berkualitas.
4. *Regulatory Quality*, mengukur kemampuan pemerintah dalam menyusun regulasi yang mendukung sektor swasta dan pembangunan ekonomi.
5. *Rule of Law*, mengukur sejauh mana hukum ditegakkan secara adil dan efektif, termasuk perlindungan hak milik dan independensi peradilan.
6. *Control of Corruption*, mengukur upaya pemerintah dalam mengendalikan dan mengurangi korupsi di sektor publik.

Good governance menjadi indikator penting dalam menciptakan pembangunan yang berkelanjutan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta menarik investasi domestik dan asing.

3.3.3. **Pengeluaran Pemerintah**

Menurut *Worldbank*, pengeluaran pemerintah termasuk pengeluaran oleh otoritas nasional dan lokal untuk kebutuhan publik dengan umur lebih dari satu tahun.

Pengeluaran pemerintah dalam penelitian ini mencakup pengeluaran pemerintah secara total pada investasi infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan pada periode 1996-2023. Dalam penelitian ini menggunakan data persentase dari total GDP, satuan data yang akan digunakan berupa persen (%) dan data yang diperoleh bersumber dari *World Bank*

Rumus persentase pengeluaran pemerintah dari total GDP:

$$\text{Government expenditure \% of GDP} = \frac{\text{Total Pengeluaran pemerintah}}{\text{GDP}} \times 100$$

3.3.4. Foreign Direct Investment

Menurut *Worldbank* (2023), *foreign direct invesment* adalah investasi yang dilakukan oleh perusahaan atau individu asing di negara lain dengan tujuan memperoleh kepemilikan langsung atas aset atau bisnis di negara tersebut. Dalam penelitian ini menggunakan data persentase dari total GDP dari tahun 1996-2023, satuan data yang akan digunakan berupa persen (%) dan data yang digunakan bersumber dari *World Bank*

Rumus persentase FDI dari total GDP:

$$\text{FDI Inflows \% of GDP} = \frac{\text{Total FDI Inflows}}{\text{GDP}} \times 100$$

3.4 Metode dan Model Analisis Data

3.4.1 Model Penelitian

Model persamaan regresi *time series* yang akan digunakan pada penelitian ini mengadopsi model Gujarati (2012) sebagai berikut:

$$PE = f(x)$$

$$PE_t = \alpha + \phi_1 PE_{it-1} + \beta_1 X1_t + \beta_2 X2_t + \beta_3 X3_t + \beta_4 X4_t + \beta_5 X5_t + \beta_6 X6_t + \beta_7 X7_t + \beta_8 X8_t + \epsilon_t$$

Di mana:

ϕ_1 : Koefisien autoregresif

α : Konstanta

PE_{It-1} : Pertumbuhan ekonomi negara i pada tahun sebelumnya

$\beta_1 X1_t$: *Good governance* indikator suara dan akuntabilitas negara i pada tahun t

$\beta_2 X2_t$: *Good governance* indikator stabilitas politik dan ketiadaan kekerasan/terorisme negara i pada tahun t

$\beta_3 X3_t$: *Good governance* indikator efektivitas pemerintah negara i pada tahun t

$\beta_4 X4_t$: *Good governance* indikator pada kualitas peraturan negara i pada tahun t

$\beta_5 X5_t$: *Good governance* indikator aturan hukum negara i pada tahun t

$\beta_6 X6_t$: *Good governance* indikator pada pengendalian korupsi negara i pada tahun t

$\beta_7 X7_t$: Pengeluaran pemerintah negara i pada tahun t

$\beta_8 X8_t$: *Foreign Direct Investment* negara i pada tahun t

B_0 : Konstanta

B_1, \dots, β_3 : Koefisien regresi

ϵ_t : Error term pada tahun t

3.4.2 Metode Analisis Data

Dalam penelitian ini, alat analisis yang digunakan adalah metode regresi *time series* yang diolah dengan perangkat lunak *Stata*. Penelitian ini bertujuan untuk menguji hubungan antara variabel-variabel yang diteliti dalam kurun waktu tertentu dan menghasilkan data numerik yang dapat dianalisis menggunakan teknik statistik (Creswell, 2014). Berikut adalah beberapa tahapan metode regresi *time series*:

3.4.2.1 Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik adalah serangkaian pengujian statistik yang dilakukan dalam analisis regresi linear untuk memastikan bahwa model yang digunakan memenuhi asumsi-asumsi dasar regresi. Pengujian ini penting agar hasil analisis regresi valid,

tidak bias, dan dapat diandalkan untuk pengambilan keputusan. Beberapa jenis uji asumsi klasik yang perlu dilakukan, yaitu:

1. Uji Normalitas: Uji normalitas bertujuan untuk memastikan bahwa residual dari model regresi mengikuti distribusi normal. Residual adalah selisih antara nilai yang diprediksi oleh model dan nilai aktual. Jika distribusi residual tidak normal, maka hasil dari uji signifikansi dapat menjadi tidak akurat, yang berpotensi mengarah pada kesimpulan yang keliru.

Hipotesis:

H₀: Residual terdistribusi normal.

H_a: Residual tidak terdistribusi normal.

Jika nilai signifikansi (p-value) lebih besar dari 0,05, maka H₀ diterima, menunjukkan bahwa residual terdistribusi normal

2. Uji Multikolinearitas: Uji multikolinearitas dilakukan untuk mendeteksi adanya hubungan linear yang kuat antara dua atau lebih variabel independen dalam model regresi berganda. Jika terdapat multikolinearitas, estimasi parameter regresi dapat menjadi tidak efisien, dan interpretasi koefisien regresi menjadi sulit.

Hipotesis:

H₀: Tidak terdapat multikolinearitas antara variabel independen.

H_a: Terdapat multikolinearitas antara variabel independen.

Jika nilai *Variance Inflation Factor* (VIF) lebih dari 10, maka H_a diterima, menunjukkan adanya multikolinearitas yang serius

3. Uji Heteroskedastisitas: Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk memeriksa apakah varians residual tetap konstan di seluruh rentang nilai variabel independen. Jika varians residual tidak konstan (heteroskedastisitas), maka model regresi dapat memberikan estimasi yang tidak efisien dan hasil uji hipotesis yang tidak valid.

Hipotesis:

H₀: Tidak terdapat heteroskedastisitas (varians residual konstan).

H_a: Terdapat heteroskedastisitas (varians residual tidak konstan).

Jika hasil uji menunjukkan nilai signifikansi kurang dari 0,05, maka H_a diterima

3.4.2.2 Uji Hipotesis

1) Uji t

Bertujuan untuk menguji signifikansi masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen. Uji ini dilakukan untuk mengetahui apakah variabel independen tertentu memiliki pengaruh signifikan pada variabel dependen dengan asumsi variabel lain tetap. Nilai *p-value* dibandingkan dengan tingkat signifikansi (misalnya 0,05).

- a. Apabila $t \text{ hitung} < t \text{ tabel}$ maka hipotesis ditolak, artinya variabel independen tidak berpengaruh terhadap variabel dependen.
- b. Apabila $t \text{ hitung} > t \text{ tabel}$ maka hipotesis diterima, artinya variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen.

Dalam penelitian ini, uji-t adalah sebagai berikut:

1. *Good governance*

H₀: $\beta_1, \beta_2, \beta_3, \beta_4, \beta_5, \beta_6 = 0$, Tidak terdapat pengaruh antara seluruh indikator *good governance* terhadap Pertumbuhan ekonomi di negara-negara anggota ASEAN.

H_a: $\beta_1, \beta_2, \beta_3, \beta_4, \beta_5, \beta_6 > 0$, Terdapat pengaruh antara seluruh indikator *good governance* terhadap Pertumbuhan ekonomi di negara-negara anggota ASEAN.

2. Pengeluaran Pemerintah

H₀: $\beta_7 = 0$, Tidak terdapat pengaruh antara pengeluaran pemerintah terhadap Pertumbuhan ekonomi di negara-negara anggota ASEAN.

H_a: $\beta_7 > 0$, Terdapat pengaruh antara pengeluaran pemerintah terhadap Pertumbuhan ekonomi di negara-negara anggota ASEAN.

3. FDI

H₀: $\beta_8 = 0$, Tidak terdapat pengaruh antara FDI terhadap Pertumbuhan ekonomi di negara-negara anggota ASEAN.

H_a: $\beta_8 > 0$, Terdapat pengaruh antara FDI terhadap Pertumbuhan ekonomi di negara-negara anggota ASEAN.

2) Uji F

Digunakan untuk mengevaluasi signifikansi model regresi secara keseluruhan, yaitu untuk menentukan apakah variabel independen secara bersama-sama memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen. Hasil uji ini ditentukan melalui nilai probabilitas (*p-value*).

Kriteria pengujiannya adalah sebagai berikut:

H₀ ditolak dan **H_a**, diterima, jika $F_{hitung} > F_{tabel}$.

H₀ diterima dan **H_a**, ditolak, jika $F_{hitung} < F_{tabel}$.

3) Uji Koefisien Determinasi (R^2):

Digunakan untuk mengukur seberapa baik model regresi dapat menjelaskan variabilitas dalam variabel dependen. Nilai R^2 berkisar antara 0 hingga 1.

- a. Apabila nilai R^2 atau mendekati 0 (nol), artinya terdapat keterbatasan pada kemampuan variabel bebas dalam menjelaskan variabel independennya. Sehingga disimpulkan bahwa tidak adanya keterkaitan antara variabel bebas dengan variabel terikat.
- b. Apabila nilai R^2 mendekati 1 (satu), artinya dalam memberikan informasinya variabel independen dibutuhkan untuk memprediksi variabel dependen. Sehingga disimpulkan bahwa terdapat adanya keterkaitan antara variabel bebas dengan variabel terikat.

V. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh *good governance*, pengeluaran pemerintah, dan *Foreign Direct Investment* (FDI) terhadap pertumbuhan ekonomi di negara-negara berkembang anggota ASEAN selama periode 1996–2023. Berdasarkan hasil analisis data menggunakan regresi time series dan pengujian statistic asumsi klasik, dapat disimpulkan beberapa hal utama sebagai berikut:

1. Peran *good governance* dalam pertumbuhan ekonomi di kawasan negara berkembang ASEAN menunjukkan hasil yang bervariasi di setiap negara, diantaranya:
 - a) *Voice and Accountability* (VA) berpengaruh dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Laos dan Vietnam. Ketika masyarakat diberi ruang untuk menyampaikan pendapat, ikut serta dalam pemilu yang bebas, dan memiliki akses pada media yang independen, maka tercipta kepercayaan terhadap pemerintah. Hal ini mendorong stabilitas sosial dan menjadi sinyal positif bagi investor.
 - b) *Political Stability and Absence of Violence* (PS) berpengaruh dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Kamboja dan Malaysia namun tidak pada negara Filipina, Indonesia, Laos, Thailand dan Vietnam. Stabilitas politik memperkuat keyakinan pelaku usaha dan investor terhadap keberlanjutan kebijakan ekonomi. Negara yang aman dari konflik sosial dan politik lebih mampu menjaga iklim usaha dan arus modal. Ketika ada ketidakpastian politik, investasi cenderung tertahan atau pindah ke negara lain yang lebih stabil.

- c) *Government Effectiveness* (GE) berpengaruh positif pada pertumbuhan ekonomi di Filipina, Indonesia, Laos, dan Thailand yang dapat terjadi karena efektivitas pemerintah dalam melayani publik dan mengeksekusi kebijakan sangat menentukan keberhasilan pembangunan. Negara dengan birokrasi yang responsif dan efisien dapat menyerap anggaran secara tepat dan mendorong pertumbuhan ekonomi melalui pelayanan publik yang lebih baik dan cepat.
- d) *Regulatory Quality* (RQ) berpengaruh positif di Laos, Kamboja, dan Vietnam terhadap pertumbuhan ekonomi di namun tidak dengan Filipina, Indonesia, Malaysia, dan Thailand. Hal ini dapat dimungkinkan karena regulasi yang jelas, tidak tumpang tindih, dan pro-bisnis menciptakan kepastian hukum bagi investor. Negara yang memiliki kebijakan ekonomi yang stabil dan tidak mudah berubah-ubah akan lebih dipercaya oleh investor dalam maupun luar negeri. Ini adalah sinyal kuat bahwa reformasi regulasi berdampak nyata terhadap ekonomi.
- e) *Rule of Law* (RL) berpengaruh positif di Filipina, Indonesia, Malaysia, Thailand, Vietnam dan berpengaruh negatif di Laos dan Kamboja terhadap pertumbuhan ekonomi. Negara dengan sistem hukum yang kuat, penegakan kontrak yang adil, serta perlindungan hak milik akan menarik lebih banyak investasi dan mendorong aktivitas ekonomi. Kepastian hukum menjadi elemen kunci dalam menjaga kepercayaan jangka panjang terhadap negara.
- f) *Control of Corruption* (CC) hanya berpengaruh positif di Filipina dan Malaysia serta berpengaruh negatif di negara Indonesia, Laos, Kamboja, Thailand, dan Vietnam. Di negara yang berhasil menekan korupsi, penggunaan anggaran lebih efisien dan hasil pembangunan lebih merata. Sebaliknya, di negara di mana korupsi masih tinggi, efektivitas kebijakan ekonomi terganggu, dan kepercayaan investor menurun. Ini menandakan pentingnya transparansi dan sistem pengawasan yang ketat di sektor publik.

2. Pengeluaran pemerintah terbukti berpengaruh positif pada Filipina, Laos, Kamboja, Vietnam dan berpengaruh negatif di negara Indonesia, Malaysia, dan Thailand. Hasil ini menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah mampu mendorong peningkatan output nasional secara nyata. Oleh karena itu, pengelolaan anggaran yang efisien, transparan, dan terarah sangat diperlukan agar belanja negara dapat memberikan dampak jangka panjang terhadap pertumbuhan dan kesejahteraan.
3. *Foreign Direct Investment* (FDI) menunjukkan pengaruh negatif di Indonesia, Kamboja dan berpengaruh positif di Filipina, Laos, Malaysia, Thailand dan Vietnam. FDI berkontribusi melalui penciptaan lapangan kerja, peningkatan kapasitas produksi, serta transfer teknologi yang mendorong produktivitas nasional. Namun, di Indonesia, FDI tidak menunjukkan pengaruh signifikan, yang kemungkinan disebabkan oleh hambatan struktural seperti birokrasi investasi, kurangnya integrasi dengan sektor domestik, atau minimnya alih teknologi.

Secara keseluruhan, hasil penelitian ini menegaskan bahwa ketiga variabel *good governance*, pengeluaran pemerintah, dan FDI berkontribusi secara signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di ASEAN. Oleh karena itu, perbaikan dalam tata kelola pemerintahan, efisiensi pengeluaran negara, dan penciptaan iklim investasi yang sehat merupakan langkah penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan di kawasan.

5.2 Saran

Berdasarkan pembahasan dan hasil sebelumnya, masih terdapat beberapa variabel yang tidak menunjukkan hubungan yang berarti terhadap pertumbuhan ekonomi di sejumlah negara ASEAN. Oleh karena itu, saran yang diberikan difokuskan pada penguatan variabel-variabel tersebut agar kontribusinya terhadap pembangunan ekonomi dapat lebih optimal di masa depan.

1. Pemerintah negara-negara ASEAN, khususnya yang belum menunjukkan hasil signifikan, perlu meningkatkan efektivitas birokrasi, kualitas regulasi, dan

penegakan hukum. Upaya pencegahan korupsi harus diperkuat melalui transparansi anggaran dan pengawasan publik. Pelibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan juga penting untuk memperkuat akuntabilitas.

2. Pengeluaran pemerintah sebaiknya difokuskan pada sektor-sektor yang memiliki dampak jangka panjang terhadap pertumbuhan ekonomi, seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Evaluasi efektivitas anggaran secara rutin juga diperlukan untuk menghindari pemborosan dan salah alokasi.
3. Pemerintah di kawasan ASEAN perlu menciptakan iklim investasi yang lebih menarik dengan memberikan kepastian hukum, insentif fiskal, dan kemudahan perizinan. Selain itu, perlunya pengawasan terhadap dampak FDI agar sejalan dengan pembangunan berkelanjutan dan tidak menimbulkan kesenjangan atau degradasi lingkungan. Oleh karena itu, pemerintah perlu membangun sinergi antara tata kelola yang baik, alokasi anggaran yang tepat, dan kebijakan investasi asing yang terarah untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.
4. Penelitian selanjutnya disarankan untuk memperluas cakupan variabel lain yang relevan seperti inflasi, ekspor-impor, atau kualitas sumber daya manusia untuk mendapatkan hasil yang lebih komprehensif. Selain itu, pendekatan kualitatif atau metode campuran juga bisa diterapkan guna menangkap dinamika kebijakan dan konteks kelembagaan yang tidak tercermin dalam data statistik. Serta penelitian yang lebih fokus, misalnya hanya pada satu negara ASEAN atau pada periode krisis tertentu.

DAFTAR PUSTAKA

- Adegboyega, R., & Arikewuyo, K. (2020). *Good Governance And Economic Development In Nigeria. Job*, 9(1), 7-22.
- Ahamed, F. (2023). Impact Of Public And Private Investments On Economic Growth Of Developing Country. *Department Of Economics, Northern Illinois University*.
- Aruan, N., Hutagalung, I., & Purba, B. (2023). Analisis Dampak Teori Keynes Dalam Mengatasi Krisis Ekonomi Melalui Kebijakan Fiskal. *Jurnal Ilmiah Manajemen Ekonomi Dan Akuntansi*, 1-7.
- Bademo, A. (2022). Governance Quality And Economic Growth In Sub-Saharan Africa: The Dynamic Panel Model. *Journal Of Economic And Administrative Sciences*, 40(2), 404-418.
- Bakari, S. (2018). The Impact Of Domestic Investment On Economic Growth New Policy Analysis From Algeria. *Bulletin Of Economic Theory And Analysis*, 3(1), 35-51.
- Baker, S., Bloom, N., & Davis, S. (2015). Measuring Economic Policy Uncertainty.
- Batheories. (2024, March 19). *Dunning's Eclectic Paradigm (OLI Framework) Explained*. Retrieved From Batheories: <https://www.batheories.com/eclectic-paradigm-oli-framework/>
- Bernales, R. M., Canon, A. M., & Cabauatan, R. R. (2024). The Role Of Governance Quality In Driving Economic Prosperity In ASEAN-5. *TWIST*, 19(4), 71-81.
- Bhutto, M., Shaikh, E., & Shah, P. (2023). The Impact Of Public And Private Investment On Economic Growth Of Pakistan. *Progressive Research Journal Of Arts & Humanities*, 4(2).
- Biswas, N. (2024). Unlocking Economic Growth: The Transformative Role Of Infrastructure Finance In India. *Economic Affairs*, 69(2).
- Biswas, R. (2024, 12 20). *ASEAN Economic Outlook In 2024*. Retrieved 12 20, 2024, From Market Intelegence, S&P Global: <https://www.spglobal.com/marketintelligence/en/mi/research-analysis/asean-economic-outlook-in-2024-jan24.html>

- Buhaerah, P. (2017). Impact Of Financing To The Income Inequality In Asean: Data Panel Analysis. *Buletin Ekonomi Moneter Dan Perbankan*, 19(3), 335-352.
- Byrne, B. (2016). *Structural Equation Modeling With Amos: Basic Concepts, Applications, And Programming (3rd Edition)*. New York And London: Routledge Taylor & Francis Group. In Structural Equation Modeling With AMOS.
- Cahyono, T. (2015). *Buku Statistik Uji Normalitas*. Purwoketo : Yayasan Sanitarian Banyumas (Yasamas).
- Canh, N. T., & Phong, N. A. (2017). The Linkage Between Public, Private Investment And Economic Growth Evidence For The Developing ASEAN And Asian Countries. *Journal Of Economics And Public Finance*, 3(4), 580-594.
- Canh, N., & Phong, N. (2017). The Linkage Between Public, Private Investment And Economic Growth Evidence For The Developing ASEAN And Asian Countries. *Journal Of Economics And Public Finance*, 3(4), 580-595.
- Chen, J. (2019, May 12). *Eclectic Paradigm: Definition, Example, Advantages*. Retrieved From Investopedia: <https://www.investopedia.com/terms/e/eclecticparadigm.asp>
- Cialani, C., Chala, A., & Mortazavi, R. (2024). Does Governance Explain Growth? An Empirical Analysis On African Countries. 124-140.
- Creswell, J. W. (2014). *Research Design: Qualitative, Quantitative And Mixed Methods Approaches (4th Ed.)*. Thousand Oaks, CA:Sage.
- Danaj, E., & Reçi, L. (2024). Public Investment, Economic Growth And Efficiency. *Agora International Journal Of Juridical Sciences*, 18(1), 153-164.
- Economy, T. G. (2025, June). *Vietnam: Voice And Accountability*. Retrieved From Theglobaleconomy.Com: https://www.theglobaleconomy.com/Vietnam/Wb_Voice_Accountability/
- Elena, G., Aleksei, V., Ulyana, A., & Natalia, V. (2018). Specifics Of Economic Growth Of Developing Countries. In *Economics* (Pp. 139-146).

- Fathia, S. (2021). How Good Government Governance Affect The Economic Growth? An Investigation On Selected Country Around The World. *Asian Journal Of Economics, Business And Accounting*, 21(7), 93-98.
- Fry, M. J. (1993). *Foreign Direct Investment In Southeast Asia: Differential Impacts*. Institute Of Southeast Asian.
- Gafur, A., & Rochaida, E. (2022). Determinan Tingkat Pertumbuhan Ekonomi Dan Tingkat Kemiskinan. *Forum Ekonomi*, 24(1), 92-102.
- Gallo, E. (2024). Public Investment As A Source Of Capacity-Creating Autonomous Demand: Implications For Growth And Stability. *Review Of Political Economy*, 1-15.
- Grace, G. (2019). Factors Affecting Inward Foreign Direct Investment: Case Of ASEAN Country. *Infoartha*, 3(2).
- Haciyev, M. (2021). Economic Growth Theory's. 8(2), 176-182.
- Hair, J. F., Ringle, C. M., & Sarstedt, M. (2011). PLS-SEM: Indeed A Silver Bullet. *Journal Of Marketing Theory And Practice*, 19(2), 139-152.
- Hossin, A. M., Alemzero, D., Hermas, A., & Yin, S. (2024). Examining Public Private Partnership Investment In Energy Towards Achieving Sustainable Development Goal 7 For ASEAN Region. *Dental Science Reports*, .
- Hudson, E. (2020). *Economic Growth: A Different View*. New Zeland.
- Iddawela, Y., Lee, N., & Rosriguez-Poze, A. (2021). Quality Of Sub-National Government And Regional Development In Africa. *The Journal Of Development Studies*, 57(8), 1282-1302.
- Institute, C. F. (2023). *Eclectic Paradigm: An Economic And Business Method For Analyzing The Attractiveness Of Making A Foreign Direct Investment*. Retrieved From Corporatefinanceinstitute: <https://Corporatefinanceinstitute.Com/Resources/Management/Eclectic-Paradigm/>
- Ismawati, L. (2023). Composite Stock Price Index During Covid-19 Pandemic At The Indonesian Stock Exchange. *Proceeding Of International Conference On Business Economics Social Sciences And Humanities*, 3, 523-528.
- Karis, C. (2020). The Relationship Between Economic Growth And Democracy: A Conceptual Approach. *Sosyal Mucit Academic Review*, 2-12.

- Kemenkeu. (2018, September 11). *Seri Ekonomi Makro - Teori Pertumbuhan Ekonomi*. Retrieved From Kemenkeu Learning Center: <https://Klc2.Kemenkeu.Go.Id/Kms/Knowledge/Klc1-Seri-Ekonomi-Makro-Teori-Pertumbuhan-Ekonomi/Detail/>
- Kementrian PPN/Bappenas. (2020, 01 20). *Pertumbuhan Ekonomi Butuh Dukungan Riset*. Retrieved From Knowledge Sector Initiative: <https://Www.Ksi-Indonesia.Org/Id/Wawasan/Detail/1139-Pertumbuhan-Ekonomi-Butuh-Dukungan-Riset>
- Khotob, A., & Mustafa, M. (2024). Debt Dynamics And Investment Patterns: Public Debt-Investment Nexus In G7 And ASEAN Economies. *Journal Of Politics And Economics*.
- Khouya, M., & Benabdelhadi, A. (2020). *Good Governance And Its Impact On Economic Development: A Systematic Literature Review*. *International Journal Of Accounting, Finance, Auditing, Management And Economics*, 1(1), 47-67.
- Kim, N. (2023). The Effects Of Trade And FDI On Economic Growth In ASEAN. *Muyeog Tongsang Haghoej*, 119-131.
- Kumaat, R., Debby, C., & Vekie, A. (2019). Analysis Of Income Inequality And Its Effect On Poverty Through Economic Growth (Case Of Talaud Islands District). *Advances In Economics, Business And Management Research*, 178-181.
- Malesky, E., Mcculloch, N., & Nath, N. (2015). The Impact Of Governance And Transparency On Firm Investment In Vietnam. *Economics Of Transition*, 23(4), 677-715.
- Mankiw, N. G. (2009). *Macroeconomics Seventh Edition*. New York: Worth.
- Mankiw, N., & Gregory. (2003). *Teori Makroekonomi* (5 Ed.). Jakarta: Erlangga.
- Mankiw, N., & Romer, D. (1991). *New Keynesian Economics*. Cambridge: Harvard University.
- Maulidah, A., Yuzrizal, & Tambunan, K. (2023). Analisis Determinan Pertumbuhan Ekonomi IMT-GT Periode Tahun 200-2021. *Journal Of Islamic Economics And Finance*, 125-143.
- Mayer, D., & Sanusi, K. (2019). A Causality Analysis Of The Relationships Between Gross Fixed Capital Formation, Economic Growth And

- Employment In South Africa. *Studia Universitatis Babe Bolyai Oeconomica*, 65(1), 33-44.
- Melesko, C. (2024). The Importance Of Public Spending In Brazil's Economic Development (2000 To 2023). *Revista Gênero E Interdisciplinaridade*, 5(5), 348-364.
- Mulyani, S. (2021). *Metodologi Penelitian*. Bandung: Widina Bhakti Persada.
- Ndanusa, A., Adamu, A., & Madu, B. (2024). Analysis Of Private Sector Investment On Economic Growth In Nigeria. *The Celapai Journal Of Economics*, 8(1), 221-233.
- Nguyen, C., & Trinh, L. (2018). The Impacts Of Public Investment On Private Investment And Economic Growth. *Journal Of Asian Business And Economic Studies*, 25(1), 15-32.
- Nguyen, V. (2020). Governance Environment And The Public Investment – Private Investment Relationship. *Southeast Asian Economies*, 8(1), 139-171.
- OECD. (2022). *Nominal Gross Domestic Product*. Retrieved From Indicators.
- OECD. (2023). *Corruption Perceptions Index*. Retrieved From Transparency.Org: https://www.transparency.org/en/cpi/2023?gad_source=1&gclid=Cjwkcawjwufq2bhameiwanzqw8uzkrz9sdw5hnnxzdolruz-5snv3rrunakp5lqh5sraemugfjcakaroc_F0qavd_Bwe
- Onafowora, O. (2024). Governance Quality And Economic Growth In The Caribbean In Times Of Covid-19. *The Journal Of Developing Areas*, 58(1), 171-191.
- Parianom, R., Desmintari, & Utami, K. (2024). An Examination Of The Logistics Infrastructure's Impact On The Economic Growth Of ASEAN. *Kne Social Sciences*.
- Petrakos, G. (2023). An Empirical Investigation Of The Interactions Between Governance And Economic Growth In The Case Of Greece. *Theoretical Economics Letters*, 13(7), 1684-1697.
- Phong, N. (2017). The Linkage Between Public, Private Investment And Economic Growth: Evidence For The Developing ASEAN And Asian Countries. *Journal Of Economics And Public Finance*, 3(4), 580-595.

- Prastowo, P., & Hanan, V. (2025). Analisis Pengaruh Kualitas Institusi Dan FDI Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Negara ASEAN. *Jurnal Kebijakan Ekonomi Dan Keuangan*.
- Putri, D., & Idris. (2024). Analisis Determinan Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia. *Media Riset Ekonomi Pembangunan (Medrep)*, 145-155.
- Rahmadiani, A., Nairobi, & Darmawan, A. (2023). Pengaruh *Government Effectiveness* Dan *Foreign Direct Investment* Terhadap GDP Di Negara Asia Selatan. *Jurnal Riset Ilmu Ekonomi (JRIE)*, 3(3).
- Rana, S. (2022). Why Research On Economic Growth Is Important? Future Research Areas On Economic Growth. *FIIB Business Review*, 11(2), 127-129.
- Rawat, A., & Khan, L. (2020). Exploring The Link Between Public Investment And Long Run Economic Growth. *Pénzügyi Szemle = Public Finance Quarterly*, 65(2), 151-167.
- Scandizzo, P., & Pierleoni, M. (2020). Short And Long-Run Effects Of Public Investment: Theoretical Premises And Empirical Evidence. *Theoretical Economics Letters*, 10(4), 834-867.
- Spilioti, N. (2024). European Structural And Investment Funds (Esifs) And Regional Development Across The European Union (EU). *Journal Of Risk And Financial Management*, 17(4), 228.
- Sulong, A., Esquivias, M., Shaari, M., & Rahim, H. (2024). The Impacts Of Economic Growth, Investment, And Environmental Degradation On Public Debt: New Evidence From The ASEAN-5 Countries. *Journal Of Infrastructure Policy And Developmen*, 8(8), 6391`.
- Surgawati, I. (2020). Pengeluaran Pemerintah Dan Pertumbuhan Ekonomi: Hipotesis Keynes Versus Teori Wagner. *WELFARE Jurnal Ilmu Ekonomi*, 1(1).
- The Asean Secretariat. (2023). *ASEAN Launches Investment Report 2023*. Association Of Southeast Asian Nations.
- Tidiane, N. (2019). Corruption, Investment And Economic Growth In WAEMU Countries. *International Journal Of Economics And Finance*, 11(4), 30.
- Todaro, M. (2006). *Pembangunan Ekonomi Di Dunia Ketiga*. Edisi Kesembilan. Jakarta: Erlangga.

- Turan, T., Yanikkaya, H., & Ozer, A. (2021). Economic Growth Effects Of Public And Private Investment: Evidence From Dynamic Panel Estimation For Developed And Developing Countries. *Prague Economic Papers*, 30(5), 613-631.
- Unnikrishnan, N., & Kattookaran, T. (2020). Impact Of Public And Private Infrastructure Investment Economic Growth Evidence From India. *Journal Of Infrastructure Development*, 12(2), 119-138.
- Vu, H., Lam, D., & Nguyen, T. (2024). Impact Of Public Investment Governance On Provinces Economic Growth: A Spatial Approach. *Journal Of Governance & Regulation*, 13(4), 186-196.
- Wahyudi. (2020). Pengeluaran Pemerintah Dan Implikasinya Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dan Tingkat Kemiskinan Di Indonesia. *Prosiding Seminar Akademik Tahunan Ilmu Ekonomi Dan Studi Pembangunan*.
- Warner, M. A. (2014). *Public Investment As An Engine Of Growth*. International Monetary Fund.
- Wicaksono, A., Gibran, A., Irmansyah, D., & Aji, H. (2021). Jurnal Ukuran Penyebaran Data (Kemiringan & Keruncingan). *Ubsi*.
- Widjanarko. (2021). Analisis Hubungan *Good Governance* Dan Pertumbuhan Ekonomi Indonesia 2013-2019. *Jurnal Good Governance*, 17(2).
- Wijayanto, B. (2019). Teori Pertumbuhan Endogenous (Endogenous Growth Theory). *Paper*.
- Wilson, R. (2016). Does Governance Cause Growth? Evidence From China. *World Development*, 79, 138-151.
- Wong, W., Nguyen, T., Darsono, S., & Jati, H. (2022). *Good Governance And Sustainable Investment: The Effects Of Governance Indicators On Stock Market Returns*. *Advances In Decision Sciences*, 26(1), 1-33.
- World Bank. (2023). *Economy*. Retrieved From World Development Indicators By World Bank: <https://datatopics.worldbank.org/world-development-indicators/themes/economy.html>
- Worldbank. (2024). *Worldwide Government Indicator*. Retrieved 01 01, 2024, From <https://www.worldbank.org/en/publication/worldwide-governance-indicators>

- Yuliana, S. (2023). The Effect Of Foreign Debt, Foreign Direct Investment, And Inflation On Economic Growth In 7 Asean Countries For The Period 2012-2020. *International Journal Of Islamic Education Research And Multiculturalism (Ijierm)*, 5(2), 247-257.
- Zainal, A., Farza, T., Putra, P., Harahap, K., & Welly, Y. (2023). Government Governance, Government Quality, Transportation Infrastructure, And The Economic Growth: Evidence From Indonesia. *Jurnal Samudra Ekonomi Dan Bisnis*, 14(1), 113-128.
- Zhang, J., Zhang, R., Xu, J., Wang, J., & Shi, G. (2021). Infrastructure Investment And Regional Economic Growth: Evidence From Yangtze River Economic Zone. *Land*, 10(3), 320.